

INOVASI TERJEGAL  
E-MONEY

POTENSI HUTAN DALAM  
KONTEKS PENELITIAN

# MEDIA BPP

JENDELA INFORMASI KELITBANGAN

## RAKORNAS KELITBANGAN 2017

PALANGKA RAYA TERPILIH MENJADI TUAN RUMAH  
PERHELATAN AKBAR RAKORNAS KELITBANGAN  
2017. KEGIATAN TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT  
MEMBERIKAN EFEK POSITIF BAGI LEMBAGA  
KELITBANGAN DI MASA MENDATANG

VOLUME 2 NO 2 | APRIL 2017



9 772528 418001

<http://jibppng.kemendagri.go.id>  
Majalah Dwi Bulanan  
p-ISSN 2503 3352  
e-ISSN 2528 4181

# HELP A CHILD FIND HIS WAY.

Thousands of children can't  
write their own names.  
Give them a chance at a  
better future



## SALAM REDAKSI

Perhelatan akbar yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) setiap tahunnya, dalam acara Rakornas Litbang (Rapat Koordinasi Nasional Litbang) menjadi momentum yang tepat untuk saling berbenah diri. Tidak hanya ajang tempat untuk bersilaturahmi BPP se-Indonesia, acara ini kerap dijadikan sebagai ajang tukar pendapat, pengalaman, dan tempat berkeluh kesah atas permasalahan Litbang di daerah selama ini.

Bertempat di Kota Cantik (Terencana, Aman, Nyaman, Indah, dan Keterbukaan) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rakornas Litbang 2017 kali ini digelar. Membahas topik-topik Kelitbang yang lebih intim dan serius, menjadikan Rakornas kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Perhelatan seluruh Rakornas dari awal sampai akhir ini yang kami rangkum dalam Laporan Utama Media BPP Edisi April 2017. Mulai dari pemilihan tuan rumah Ibu Kota Palangka Raya, permasalahan kelembagaan paska disahkan-nya PP No 18 Tahun 2016 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah), pengelolaan keuangan lembaga, dan segenap permasalahan BPP yang tidak kunjung tuntas ini, semuanya BPP Kemendagri bahas dalam rapat per komisi dan dirangkum dalam laporan khas

edisi kali ini.

Selain itu, masih berhubungan dengan Rakornas, redaksi juga menyuguhkan laporan mengenai Jumpun Pabelo, sebuah hutan lindung yang bersama-sama dijaga oleh warga pasca kebakaran lahan gambut pada 2014 silam melalui kerja keras yang pantang menyerah oleh aktivis lingkungan, Januminro. Dengan kerja kerasnya membangun sumur bor, tim pengendali api, dan mendaur ulang lahan gambut bekas kebakaran ia berhasil menyabet beberapa penghargaan nasional dari pemerintah.

Tidak hanya menyuguhkan laporan Rakornas, redaksi juga mengajak seluruh pembaca untuk mengenal BPP Kemendagri dan segala program kegiatannya lebih mendalam, melalui rubrik Jendela BPP yang sudah mulai *launching* sejak Februari 2017. Di rubrik ini, pembaca akan memahami apa saja “kesibukan” yang sedang kami lakukan selama setahun ke depan. Agar masyarakat senantiasa mengetahui, mengapa keberadaan Litbang harus tetap ada dan tetap dihidupkan. Mengutip dari tokoh Syaikh Usman dalam rubrik “Lebih Dekat” edisi kali ini, “Bukan seberapa banyak kamu menghasilkan karya penelitian, tapi seberapa banyak orang lain tahu dan pergunakan apa yang kalian teliti”



Redaksi

## MEDIA BPP

PELINDUNG Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo  
PENANGGUNG JAWAB Dodi Riyadmadji

PEMIMPIN REDAKSI	Jonggi Tambunan
REDAKTUR PELAKSANA	Moh. Ilham A. Hamudy
REDAKTUR	Subiyono Syabnikmat Nizam Indrajaya Ramzie Jonggi Tambunan Moh. Ilham A. Hamudy
PENYUNTING	I Nengah Rumawan Bungaran Damanik Frisca Natalia Elpino Windy
PELIPUTAN	M. Saidi Rifky Indah F. Rosalina
PENATA LETAK DAN GRAFIS	M. Saidi Rifky

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Alamat Redaksi  
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
mediabppkemendagri@gmail.com

## Menjaga Eksistensi Jurnal Matra Pembaruan

Berbeda dengan Jurnal Bina Praja (JBP) yang bersifat umum memuat naskah hasil-hasil Litbang berupa kajian kebijakan pemerintahan pusat dan daerah dari berbagai aspek implementasi dan dampaknya terhadap keberlangsungan organisasi publik dan masyarakat, Matra Pembaruan (MP) dirancang khusus dan hanya fokus pada naskah hasil-hasil Litbang tentang inovasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Untuk itu paling tidak ada 5 (lima) hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kekhasan MP sebagai jurnal inovasi kebijakan. **Pertama**, naskah yang dimuat harus konsisten mengenai kajian inovasi kebijakan. **Kedua**, artikel yang dimuat dalam jurnal MP juga harus diseleksi berdasarkan adanya temuan baru (pembaruan kebijakan), isu-isu aktual kontemporer (kekinian), dan dapat dikaji dari berbagai perspektif namun tetap fokus pada keinovasian kebijakan.

**Ketiga**, agar dapat bermanfaat secara langsung pada masyarakat, maka kajian inovasi kebijakan yang diutamakan adalah kebijakan yang benar-benar berkaitan dengan pembaruan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. **Keempat**, berbeda dengan penelitian dasar, penelitian/kajian inovasi kebijakan merupakan penelitian terapan. Naskah hasil Litbang yang disetujui untuk dimuat haruslah hasil Litbang yang menggunakan sumber data primer (bukan hanya sumber data sekunder). Dan **kelima**, jika hasil Litbang yang diajukan merupakan "replikasi" hasil inovasi kebijakan, maka sumber referensinya minimal 50% harus berasal dari sumber primer yang benar-benar dari kajian inovasi kebijakan. Kelima hal tersebut di atas perlu diinformasikan agar pengirim naskah mengetahui dengan jelas fokus artikel yang diperlukan jurnal MP. Terima kasih.

**Abdul Halik – Peneliti BPP Kemendagri**

Terima kasih atas masukan dan pencerahannya kepada seluruh peneliti dan pengelola Jurnal Matra Pembaruan, semoga masukan dari Bpk. Halik dapat menjadi pegangan untuk memajukan jurnal-jurnal BPP Kemendagri menuju jurnal bereputasi internasional

Redaksi

## Menghidupkan Karakter Bang Pepe

Saya rasa tampilan Media BPP sejak 2016 sangat menarik. Ada nuansa dan semangat baru yang ingin ditonjolkan para pengelolanya, hanya saja perlu ditambah tampilan foto dan komentar-komentar singkat tentang pejabat fungsional peneliti BPP (di luar kolom opini) yang bisa ditampilkan.

Supaya itu bisa menjaga keseimbangan antara pejabat struktural dan pejabat fungsional yang direfleksikan dalam rubrik-rubrik majalah kebanggaan BPP Kemendagri. Selain itu, karakter Bang Pepe dalam majalah BPP Kemendagri

lebih disosialisasikan kepada lingkungan BPP. Selain itu, karakter Bang Pepe dalam Media BPP lebih dihidupkan dengan tokoh unik di lingkungan BPP

**Nur Sabar – Kasubbid Investasi Daerah Puslitbang Keuangan Daerah**

*Terima kasih Bpk. Sabar atas masukannya. Segenap redaksi akan coba mempertimbangkan beberapa masukan dari Bapak, agar tampilan Media BPP lebih variatif dan enak dipandang.*

Redaksi

## Pemberitaan Media BPP

Saya sangat mengapresiasi hasil kerja keras Tim Media BPP. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu dikoreksi yakni terkait isu dalam laporan utama pada Media BPP edisi Februari 2017. Pada Laporan Utama sebaiknya diawali oleh program atau pun kegiatan yang telah dilakukan oleh BPP Kemendagri secara kelembagaan. Isu tentang revisi UU No 23 tahun 2014 telah diinisiasi oleh teman-teman peneliti dalam forum litbang strategik dan didukung oleh Plt. Kaban melalui pertemuan dengan *Ford Foundation* yang sebelumnya telah mendukung Plt. Kaban secara personal di Puspen Kemendagri dan sekarang siap mendukung Forum Litbang Strategik untuk melakukan kajian revisi UU

No 23 tahun 2014.

Ide ini sebenarnya amanah dari Mendagri dalam rapat umum dengan sejumlah struktural Eselon 1, 2, 3, dan 4 di Ruang Sasana Bhakti. Jadi jangan laporan utama merupakan *statment* personal kepada Plt. Kaban dan Sofyan saja. Pertanggungjawabannya akan terlalu berat kalau terjadi perbedaan pendapat di tataran lapangan.

Lalu terkait penempatan gambar, sebaiknya disesuaikan dengan konten yang dipaparkan. Jadi gambar juga punya arti terhadap penjelasan konten yang ada dan sebaiknya punya makna mendalam serta bukan sekadar seremonial kegiatan belaka.

**Teguh Narutomo – Kabid SDM Puslitbang Inovasi Daerah**

Terima kasih atas koreksi dan masukannya Bpk. Teguh. Pertama, mengenai laporan utama yang sebaiknya diisi oleh program kegiatan, sebenarnya kami sudah sediakan khusus di rubrik aktivitas, dan bahkan mulai Februari 2017 lalu kami sediakan lagi rubrik khusus Jendela BPP yang membahas mengenai 4 kegiatan pusat dan 1 sekretariat. Dari situ akan kami cover segala kegiatan di BPP. Lalu kedua, terkait pemilihan narasumber, memang redaksi mendapatkan amanah dari Plt. Kepala Badan untuk mewawancarai si A dan si B, hanya saja memang kami tidak memperkaya sumber dari beberapa narasumber ahli karena keterbatasan waktu (deadline). Tentunya ini akan menjadi koreksi dan pembelajaran bagi kami di penerbitan yang akan datang. Salam hangat.

Redaksi.

# MEDIA BPP

VOLUME 2 NO 2 | APRIL 2017

## BPP DAERAH 28 Memaksimalkan Dukungan Pemerintah Kota

Kesuksesan penyelenggaraan Rakornas Kelitbangan 2017 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah tidak terlepas dari peran tuan rumah yaitu BPP Kota Palangka Raya yang memberikan dukungan penuh. Rakornas diharapkan bisa menjadi *multiplier effect* bagi BPP Palangka Raya di masa mendatang.

AKTIVITAS 8

JENDELA BPP 14

KILAS BERITA 40

SAINS DAN TEKNOLOGI 42

GAYA HIDUP 49

RESENSI FILM 46

RESENSI BUKU 48

KOMIK 53

SASTRA 50

OPINI

Inovasi di Persimpangan Jalan 55  
Pengejawantahan Demokrasi Pancasila 56

CATATAN

Sang Demagog Ibu Kota 58

## DAERAH 32

Terminal Leuwi Panjang, Bandung  
Inovasi Terjegal e-Money

Sebagai salah satu terminal tipe A yang berada di Kota Bandung, Terminal Leuwi Panjang menjadi titik sentral keberangkatan setiap bus antarkota dan provinsi yang melanjutkan perjalanan ke wilayah barat Indonesia, seperti ke Jakarta dan Banten.

## Tokoh 36

Memasuki usia 72 tahun, tidak menjadikan **SYAIKU USMAN** untuk tetap produktif dalam dunia penelitian. Bahkan menurutnya, jika akal dan pikiran dibiarkan istirahat begitu saja setelah sekian lama banyak digunakan untuk meneliti justru akan mengalami kemunduran berfikir dan memperlambat peneruan.



## LAPORAN UTAMA 18-27

# RAKORNAS KELITBANGAN 2017

Palangka Raya terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar Rakornas Kelitbangan 2017, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif bagi lembaga kelitbangan di masa mendatang.





**DI SEKITAR SUNGAI:** Kehidupan sekitar sungai Kahayan yang melintasi Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Menurut penuturan penduduk setempat, di sekitar sungai Kahayan saat ini jauh lebih sepi dibanding beberapa tahun lalu ketika belum dilakukan pengecoran jalan, di pinggir sungai ini.

## PROGRAM NASIONAL BERI WARNA BARU PROGRAM KELITBANGAN

**RENCANA** Kerja Pemerintah 2018 dalam rangka melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menuntut beberapa K/L (Kementerian dan Lembaga) melaksanakan PN (Program Nasional), PP (Program Prioritas), dan KP (Kegiatan Prioritas ke dalam ProPN (Proyek Prioritas Nasional)

**B**er tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”, pemerintah fokus pada 18 agenda yaitu 10 PN dan 30 PP, hal itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengawal pencapaian sasaran prioritas nasional sebagai bagian dalam pelaksanaan *money follow program*.

Peneliti BPP Kemendagri, Ray Septianis Kartika mengungkapkan, ada beberapa syarat yang mengategorikan sebuah kegiatan menjadi PN, Pertama sebuah K/L harus mempunyai kelengkapan data meliputi ruang lingkup (fokus), jangka waktu dengan tahapan/siklus proyek yang terukur, lokasi, kebutuhan anggaran. “Ini harus dijabarkan secara rinci dalam ProPN,” ungkapnya

Kedua, terkait kelayakan kegiatan yang meliputi signifikansi untuk mencapai RKP/RPJMN (Rancangan Kerja Pemerintah/Rencana Program Jangka Menengah Nasional), bukan kegiatan rutin/berulang-ulang atau kegiatan yang bersifat administratif/operasional, sesuai dengan tugas fungsi & kewenangan. “Selain itu, K/L harus memiliki muatan proyek yang memiliki tahapan siklus perencanaan-pelaksanaan. Bukan kegiatan yang selesai dilakukan dalam jangka sangat pendek,” tandasnya.

Lalu yang ketiga, menurutnya K/L perlu adanya kesiapan (implementasi program pada 2018) terdiri dari (1)



Fisik/Konstruksi meliputi terdapat kesiapan sesuai siklus proyek, kesiapan lahan pada 2018, indikator pemantauan, evaluasi, dan organisasi pelaksana kegiatan (manajemen proyek) serta identifikasi *stakeholder* yang terkait (Pusat, Daerah, Swasta/BUMN/Masyarakat). “Kemudian, terdapat pendukung non-fisik terdiri dari desain program dan kegiatan/proyek (sebaiknya didukung dengan *background study*),” terangnya.

Ketiga syarat penyusunan ProPN itu tentunya mendesak beberapa pusat di BPP Kemendagri, khususnya Pusat Litbang Inovasi Daerah untuk menjalan visi dan misi presiden dengan benar. “Di Puslitbang Inovda ini ada dua hal yang menjadi target rencana Pulitbang Inovasi Daerah 2018, yakni penerapan replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan pada daerah tertinggal, dan penilaian indeks pemerintah daerah yang inovatif (IGA),” katanya.

Sebenarnya, lanjut Ray, usulan rencana yang digagaskan Puslitbang Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut dari kegiatan 2017. “Keberlanjutan program yang mengamanatkan Pusat Inovasi Daerah mempertahankan usulan rencana 2018,

mencerminkan bahwa Puslitbang Inovasi Daerah sangat tanggap dan konsisten menggalakkan inovasi di daerah. Memberikan regulasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan inovasi daerah, menjadi harga mati yang harus dipertahankan Puslitbang Inovasi Daerah,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, target kerja pada 2018 nantinya diarahkan pada daerah tertinggal dengan 4 lokus untuk kegiatan replikasi model hasil inovasi daerah. “Pemetaan target pada prinsipnya sesuai dengan nawacita Presiden yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa,” turunya

Oleh karenanya membangun daerah tertinggal sudah menjadi keharusan Puslitbang Inovasi Daerah untuk konsisten dan komitmen. “Gagasan yang diusulkan Puslitbang Inovasi Daerah perlu didukung oleh semua pihak. Khususnya usulan rencana program 2018 agar terimplementasi dengan baik dan bermanfaat,” harapnya. (RSK/IFR)

## WORKSHOP STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA PENELITIAN



**P**ada awal Maret lalu, 16 Lembaga Penelitian seluruh Indonesia berkumpul di Hotel Santika Bandung, menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh Tempo Institute dan KSI (*Knowledge Sector Initiative*) dalam rangka membincangkan Strategi Komunikasi Hasil Riset.

Mereka tampak bersemangat dan berjiwa muda mengikuti *workshop* yang dikenal dengan sangat interaktif itu. Ada yang dari Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Ragam bidang penelitian pun bersatu, saling berkenalan, menyapa senyum, menambah relasi, dan membuat suasana Bandung menjadi hangat meski diguyur hujan lebat disertai angin dan petir yang menyambar.

Di antara mitra KSI ada yang berasal dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), CSIS (Centre for Strategic and International Studies), KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah), Article 33, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PPH (Pusat Penelitian HIV/AIDS) Atmajaya,

Puskapol (Pusat Kajian Politik) UI, PPIH UIN, PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demokrasi) Paramadina, SMERU, IRE (Institute for Research and Empowerment), PKMK (Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan) UGM, Survey Meter, Akatiga, dan Sajogjo Institute.

Tidak hanya itu, KSI dan Tempo Institute juga mengundang dari instansi pemerintahan. Diantaranya, LAN (Lembaga Administrasi Nasional), Bappenas (Badan Pembangunan Nasional), Kemendesa (Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal), dan BPP Kemendagri. “Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Rius yang akan mendampingi Bapak/Ibu, rekan-rekan semua dalam mengikuti *workshop* selama 2 hari ke depan,” kata pembawa acara dari KSI.

Hari pertama, bukan materi yang diajarkan kepada kami, bukan pula hal yang sulit untuk saling menghafalkan nama sekira 32 peserta yang hadir. Tapi kami dibawa untuk *me-rileks*-kan sejenak pikiran dengan *ice breaking* sebelum memulai kegiatan. Gaya Rius yang lucu dan cerdas mirip seperti tokoh film China, Boboho berhasil memacu semangat kami yang terdiri dari lintas usia. Rius seolah bisa memberikan

ruh dalam *workshop* sehingga tidak membosankan dan membuat peserta mengantuk.

### Berbagi pengalaman

Untuk lebih saling mengenal satu sama lain, kami dibentuk suatu kelompok yang dinamakan kelompok Do Re Mi Fa So La Si. Kelompok tangga nada itu paling tidak terdiri dari 5-6 orang perwakilan lembaga masing-masing. Dari kelompok itu kami diajarkan untuk saling berbagi pengalaman.

Kami diminta untuk bercerita tentang capaian apa saja yang sudah berhasil di lembaganya, lalu apa yang belum berhasil dan apa kendalanya. Dari berbagi pengalaman tersebut setiap kelompok dalam waktu yang bersamaan diberikan waktu 30 menit, jadi masing-masing personal mempunyai 5-6 menit untuk berbagi pengalaman. Tidak boleh ada sanggahan apalagi mencela dari apa yang disampaikan teman satu kelompoknya. Kami diminta untuk cukup mendengarkan dan mengucapkan terima kasih.

“Kita misalkan bapak/ibu pulang dari sini lalu membagikan oleh-oleh ke tetangga, pasti dari berbagi itu bapak/ibu tidak ingin diprotes dari orang yang diberi karena oleh-olehnya hanya ini, kenapa begini, kenapa tidak begitu. Pasti semua orang langsung mengucapkan terima kasih,” saran Rius.

Tiga puluh menit waktu selesai, dari setiap kelompok diminta satu orang untuk menjaga *stand* tulisan paparan yang sudah dirembug bersama.

Setiap kelompok mengunjungi masing-masing *stand* kelompok lain untuk mengetahui apa saja capaian yang telah dicapai, dan kendala apa yang biasanya terjadi. “Kalau saya lihat, teman-teman di sini sudah banyak yang produktif penelitiannya, sudah bisa mengaplikasikan strategi komunikasi yang baik dengan membuat infografis, *leaflet*, poster dan sebagainya. Tapi apakah pesan itu sudah sampai,” kata Rius.

Semua peserta diminta untuk memaparkan apa yang bisa dipelajari dari kunjungan ke semua *stand*. Ada yang menarik, beberapa peserta tampaknya mengetahui apa saja kekurangan yang harus dibenahi. "Penyampaian strategi komunikasi tidak hanya melalui infografis atau *leaflet* yang dibuat, tapi soal evaluasi dari pesan yang disampaikan. Infografis dan sebagainya, hanyalah alat untuk mencapai strategi tersebut," kata Eko, peserta dari Sajogio Institute.

### Smart Chart 3.0

Untuk menambah pemahaman mengenai strategi komunikasi, pada hari berikutnya Rius memperkenalkan narasumber ahli dari KSI. "Langsung saja kita persilahkan Mitha Mohammad," kata Rius.

Mitha adalah seorang perempuan, tapi gaya dan keperawakan seperti laki-laki. Rambutnya yang bondol dengan setelan jaket dan celana jeans, lengkap dengan kacamata minusnya membuat selintas dia seperti pria.

Nafasnya yang sesak sesekali terdengar dari cara bicaranya, belakangan peserta baru tahu jika dia mengidap Pneumonia, sebuah penyakit di paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Akibatnya ia tidak bisa bicara dengan tempo cepat dan terlalu lama. "Baik kali ini, saya akan mengenalkan model *smart chart* 3.0 yang bisa dicoba bapak/ibu dan rekan-rekan sekalian ketika kembali ke lembaganya masing-masing," kata Mitha.

Pada model *smart chart* 3.0 peserta diajarkan 6 langkah penting agar penelitian bisa mencapai tujuan yang tercapai. Kami diajak menganalisis paparan narasumber yang sudah ahli dalam strategi komunikasi.

Setidaknya ada 6 narasumber ahli yang memaparkan hasil *case study* nya, di antaranya *case study* tentang advokasi dari Elsam dan Sajogio Institute tentang hutan Lindung Nasional merupakan bagian dari Hutan Adat milik masyarakat, lalu ada pelibatan masyarakat dalam *research project* Prof. Utarini mengenai Demam Berdarah dan ada juga kampanye publik #*sayaberani* dari PPH Atma Jaya. "Selain itu, nanti juga akan ada *case study* tentang Gerakan Sadar Alzheimer dan Reklamasi Teluk Benoa," kata Rius.



Para peserta yang sudah dibentuk kelompok baru bernamakan nama kelompok band, diminta mengisi tiap lembar *smart chart* 3.0 yang sudah disiapkan panitia. Lembaran itu berisi keenam langkah strategi komunikasi sebelum merancang penelitian. Langkah pertama, peserta diminta menganalisis apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang, apa langkah terukur pertama yang harus dicapai dalam 12 bulan ke depan, dan siapakah yang bisa membuat tujuan Anda menjadi kenyataan. "Dalam langkah ini, Anda harus tahu apa tujuan besar Anda. Tujuan besar jangan hanya sekadar agar masyarakat tahu apa yang kita sampaikan, tapi adanya perubahan dengan apa yang kita lakukan," terang Mitha.

Lalu memasuki tahap kedua, peserta diminta untuk mengidentifikasi apa aset dan tantangan dari internal dan eksternal organisasi Anda. Bisa itu berupa anggaran, SDM (Sumber Daya Manusia), atau aktivitas organisasi lain. "Dari situ Anda akan melihat, apakah yang disampaikan itu adalah sebuah penelitian yang belum pernah ada, atau memperkuat penelitian terdahulu, atau bahkan mengubah kerangka perdebatan," tandasnya.

Di tahap ketiga, analisis berikutnya adalah strategi apa yang dipakai narasumber. Pada langkah ini, yang menjadi bahan analisis para peserta adalah audiens dari penelitian narasumber. "Keberhasilan komunikasi itu bukan terletak pada kelihaihan komunikator kepada audiens, tapi apa yang didengar audiens menjadi suatu pesan perubahan," tandas Mitha.

Di tahap ini, peserta diminta untuk mengetahui audiens mana yang harus Anda capai untuk mencapai tujuan, lalu audiens mana yang ada

dipermasalahan Anda, dan kepercayaan apa yang Anda miliki untuk mengatasi segala rintangan, serta siapakah yang menjadi penghubung Anda dengan audiens? "Semuanya harus jelas dipetakan demikian agar komunikasi lembaga Anda dapat tersalur dengan baik," tambahnya.

Di langkah ke empat, Anda harus membuat jadwal dan taktik yang jitu kepada audiens dengan mematuhi jadwal yang sudah dirancang. "Berapa banyak waktu dan budget yang dibutuhkan. Anda harus mengukurnya secara realistis," ungkapnya.

Terakhir, Mitha menyarankan agar peserta dapat belajar apa sebenarnya *outputs* dan *outcomes* yang diperoleh. "Caranya adalah lihat bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap hasil penelitian kita," saran Mitha.

Setelah acara pelatihan menarik itu usai, seluruh peserta diberikan modul pembelajaran bagaimana menerapkan kerangka berpikir *smart chart* 3.0 lengkap dengan contohnya.

BPP Kemendagri sebagai peserta tentu merasakan banyak manfaat dari *workshop* ini, karena selama ini hasil penelitian BPP hanya berupa rekomendasi ke Menteri Dalam Negeri tanpa tahu bagaimana

"Penyampaian strategi komunikasi tidak hanya melalui infografis atau *leaflet* yang dibuat, tapi soal evaluasi dari pesan yang disampaikan. Infografis dan sebagainya, hanyalah alat untuk mencapai strategi tersebut."

tindak lanjutnya. Sementara dalam *workshop* ini mengajarkan hasil penelitian yang sukses tidak cukup dengan mendapat dukungan dari pemerintah saja, tapi dukungan dari masyarakat juga sangat berperan.

Agar mendapatkan dukungan keduanya, dalam model *smart chart* 3.0 ini mengajarkan pada peserta bagaimana merancang taktik dan *timeline* yang tepat, sehingga saat

ada kendala, peneliti selalu punya banyak pilihan langkah apa yang segera diambil. Selain itu, panitia berharap peserta termasuk BPP Kemendagri perlu mempertimbangkan penambahan staf humas khusus yang selalu berhubungan dengan media massa dan masyarakat. Agar, *audiens* mengetahui dan memahami kegiatan penelitian apa saja yang akan, sedang, dan sudah dilak-

sanakan BPP Kemendagri selama ini.

"Terimakasih Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya berharap apa yang kita pelajari ini menjadi alternatif sebuah lembaga Bapak/Ibu dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif," tutup Mitha. (IFR)

## RAKORNAS KELITBANGAN 2017 BERLANGSUNG MERIAH



PALANGKA RAYA – Perhelatan Rakornas Kelitbangan 2017 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri berlangsung meriah. Antusiasme peserta terlihat dari jumlah peserta yang hadir hingga 500 peserta. Dalam laporan panitian yang disampaikan Plt. Sekretaris BPP Kemendagri Subiyono acara diikuti oleh seluruh Balitbangda yang ada di Indonesia.

"Sebenarnya daya tampung ruangan ini sebanyak 250 orang, kami sebagai sangat berterima kasih atas kehadiran para peserta, semoga di waktu mendatang pertemuan ini dapat mewujudkan fungsi Balitbangda sebagai lembaga think thank dan poros penelitian di Indonesia," kata Subiyono di Swiss-Belhotel Internasional Palangkaraya.

Selain Subiyono, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang diwakili oleh Syahrin Dauly Sekda Provinsi Kalteng mengatakan pihaknya menyambut baik ajang silaturahmi antar pegiat kelitbangan tersebut. Selain ajang silaturahmi menurutnya tema yang dihadirkan sangat cocok dengan karakteristik wilayah Kalimantan Tengah.

"Kami menyambut baik sebagai ajang silaturahmi, dan juga tema ini, karena dilandasi suatu fakta karakteristik beragam, maka kita dorong peran litbang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing," ucapnya.

Walikota Palangka Raya HM Riban Satia juga mengatakan hal yang sama. Menurut Riban, Rakornas Kelitbangan merupakan suatu hadiah dari BPP Kemendagri yang diberikan kepada Kota Palangka Raya. Ia pun berharap perhelatan acara bisa menghasilkan hal positif.

"Kota Palangka Raya termasuk salah satu kota yang diberi hadiah oleh BPP Kemendagri. Selain itu kami mengharapkan rakornas membuahkan hasil yang membawa nilai bagi bangsa ini," tuturnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo beserta Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar turut memberikan sambutan. Namun sambutan tersebut diwakili oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji dan Kepala Badan Litbang KLHK Hendry Basaman. (MSR)

## Isu Strategis Program Kelitbangan 2018 Dibahas

JAKARTA – BPP Kemendagri hari beberapa waktu lalu menyelenggarakan rapat Koordinasi Penyusunan Program Kelitbangan 2018 yang berlangsung di Hotel Orio Jakarta dan diadakan selama dua hari berturut-turut hingga.

Pada program 2018 kali ini, Plt. Kepala BPP berpesan, agar BPP lebih menekankan agenda program pada cita-cita Nawacita Presiden Joko Widodo dengan mengaitkan juga strategi peningkatan kualitas dan kemanfaatan arah kebijakan program.

"Selain itu, pada program 2018 mendatang BPP Kemendagri harus mengupas arah kebijakan pendanaan program penelitian dan pengembangan mendatang," kata Dodi Riyadmadji, Plt. Ketua BPP Kemendagri.

Arah kebijakan itu juga termasuk isu-isu strategis di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM (Hak Asasi Manusia) yang perlu disikapi.

Penguatan program ini juga akan diisi oleh pemaparan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Diantaranya, Direktur Otonomi Daerah, Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, Deputi V KSP, dan Direktur Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan. (IFR)

## BPP KEMENDAGRI Sosialisasikan Pengajuan Angka Kredit

JAKARTA - BPP Kemendagri hari ini (6/4) menyosialisasikan terkait pengajuan angka kredit peneliti di Lingkup BPP dan BPP Daerah. Acara yang dikordinasi oleh Bagian PJKSE (Pembinaan Jabatan Fungsional, Sisdur, serta Evaluasi Kinerja) itu juga dihadiri oleh beberapa peneliti di lingkup BPP.

Ada aturan baru mengenai pengajuan peneliti bagi BPP Daerah yang baru terbentuk. Menurut Permen PANRB No 26/2016 Pasal 2 menyebutkan persyaratan penyesuaian ke JFP (Jabatan Fungsional Peneliti) dari struktural PNS, memiliki pangkat paling rendah III/a, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFP minimal 2 tahun berturut-turut, penilaian setahun terakhir bernilai baik, usia maksimal 1/2/3 tahun sebelum BUP (Batas Usia Pensiun), tersedia sesuai bidang kepakaran, lulus uji kompetensi, dan memenuhi kualifikasi dan hasil kerja.

"Usulan dari Kementerian ke LIPI itu nantinya akan dievaluasi formulasi nasional melalui uji kompetensi dengan tim asesor pusat yang terdiri dari 2 orang pakar sebidang, 1 instansi pembina, dan 1 sekretariat. Setelah itu baru ditetapkan di MenPANRB. Pada tahun ini pengusulan penyesuaian diterima paling lambat 1 Oktober 2018," terang Yudi Kuswanto Kepala Bagian PJKSE.



Menurut data Rakornas 2017 lalu di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, ada sekira 100 BPP Daerah yang baru terbentuk paska ditetapkannya PP No 18 Tahun 2017 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Keseratus BPP itu di antaranya itu, 25 dari Provinsi, 61 dari Kabupaten, dan 14 dari Kota. "Inilah yang menjadi tugas kami sebagai induk dari BPP Daerah dalam memfasilitasi daerah yang ingin mengajukan angka kredit bagi kenaikan pangkat peneliti atau yang mau mengajukan SDM peneliti di tempatnya," tutup Yudi. (IFR)

pendapat saya pribadi tidak berisi standar dan kriteria, namun hanya petunjuk," kata Irianto.

Selain Irianto, Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan hal yang sama, ia menyayangkan peraturan yang mengharuskan penggabungan perangkat daerah dalam PP tersebut. Seperti Dinas Pengairan di Kabupaten Malang harus dilebur dengan Dinas PU. Menurut Rendra itu tidak sesuai dengan karakteristik Kabupaten Malang. "Seharusnya Kabupaten Malang memiliki tiga bidang di Dinas ke Pu-an, mengingat panjang jalan di Kabupaten Malang sepanjang 16 ribu kilometer, belum lagi urusan irigasi, kalau ditangani satu bidang tidak cukup," tuturnya.

Begitu juga dengan Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi. Ia menyayangkan pendidikan harus ditarik menjadi urusan provinsi, yang tidak mengetahui kondisi sekolah yang ada. Hasilnya beberapa sekolah pembangunannya masih tertunda. Bupati juga perlu persetujuan yang tidak sebentar jika mau membantu pembangunan kelas. "Saya sadar gubernur itu kerjanya banyak, tidak hanya mengurus sekolah, dampaknya perizinan sulit," tegas Azwar.

Namun terkait hal demikian, Gubernur Kaltara mengatakan ada sisi positif dibalik kewenangan yang dibuat pemerintah pusat, di antaranya ada keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kelembagaan yang ada di daerah, serta bertujuan meningkatkan daya saing daerah. Irianto juga berpesan agar BPP Kemendagri bisa menyampaikan semua aspirasinya kepada Mendagri bahkan Presiden.

### Komitmen terhadap kelitbangan

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di daerah juga dianggap penting oleh ketiga kepala daerah tersebut. Litbang menurut mereka berperan penting dalam setiap kebijakan yang diambil kepala daerah.

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan dirinya berkomitmen untuk tetap mempertahankan litbang ketika beberapa kali terdapat wacana pembubaran. Menurutnya semua keputusan yang bermula dari Bappeda itu dari hasil kelitbangan tidak terkecuali semua program yang dijalankan SKPD. Menurut Rendra litbang di Kabupaten Malang tetap bertahan meskipun terdapat 125 perguruan tinggi dengan aktivitas riset cukup

bagus.

Terkait Kelitbangan Gubernur Kaltara memiliki persepsi yang berbeda. Menurutnya litbang di daerah sangat penting, namun peran litbang tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Tidak dapat dimungkiri hasil inovasi di daerah terjadi karena peran kelitbangan. "Mesipun tidak diwadahi namun dapat menghasilkan inovasi dari proses kelitbangan," tuturnya.

Begitu juga dengan Abdullah Azwar Anas yang mengatakan kelitbangan tentu penting, namun kepemimpinannya tidak terpaku kepada struktur organisasi. Ia juga mengatakan pemimpin tidak harus terjebak dari struktur mahal tetapi miskin fungsi. Berbeda dengan pusat yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, litbang di daerah identik dengan pilihan akhir.

"Saya lebih suka menempatkan orang-orang yang dianggap bagus di beberapa SKPD, ketimbang menempatkan orang yang sudah tua meski sudah layak jabatan, namun belum tentu produktif," kata Azwar. (MSR)

## BERSAMA KEPALA DAERAH, BPP Bahas Perangkat Daerah

JAKARTA - Dalam menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah. BPP Kemendagri menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung desentralisasi yang diadakan di Aula BPP Kemendagri, Selasa (11/4).

Acara terasa spesial, pasalnya narasumber yang dihadirkan merupakan pemerintah daerah dan pakar pemerintahan dalam negeri. Mereka adalah Irianto Lambrie Gubernur Kalimantan Utara, Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi, Rendra Kresna Bupati Malang, serta I Made Suwandi

Komisioner Komisi ASN. Acara dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji. Acara tersebut juga terselenggara atas dukungan Ford Foundation dan Plan C.

Beberapa Kepala Daerah tersebut menanggapi beberapa hal terkait PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dirasa memberatkan bagi daerah. Kehadiran PP No 18 tentang OPD menurut Irianto Lambrie menjadikan daerah sulit berkeaktifitas. Beberapa pasal juga dianggap menyalahi prinsip ekonomi. "Beberapa pasal menurut



Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM

# Tahun Ini Laksanakan Program *Leadership Award*

Pusat Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum akan mengadakan program pemberian penghargaan pada Kepala Daerah yang memiliki kemampuan memimpin secara baik berkomunikasi dengan lembaga program melalui *stakeholder* dan juga awak media.

Menurut Kepala Pusat Litbang Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum, Syabnikmat Nizam mengatakan, *leadership* yang kuat adalah yang berkarakter dengan memahami manajemen *leadership*. "Program *Leadership Award* harus mempunyai tujuan dasar dengan landasan yang jelas untuk dipersiapkan dengan baik yang kegiatannya dianggap sangat kental politis. Maka dari itu, program ini harus terpercaya, objektif, dan bergengsi," jelasnya.

Syabnikmat juga menambahkan selama ini memang ada banyak bentuk pemberian penghargaan Kepala Daerah berdasarkan capaian atau prestasi di bidang tertentu dari Kementerian dan lembaga-lembaga lain terhadap Kepala Daerah, tapi kali ini Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum BPP Kemendagri akan memberikan penghargaan berdasarkan *personally* Kepala Daerah. "Dengan begitu juga akan tergambar tingkat kepemimpinan Kepala Daerah di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota di Indonesia," terangnya saat ditemui Media BPP pada awal April lalu.

Saat ini Puslitbang Otda intensif dalam tahap diskusi internal untuk memetakan daerah mana saja yang akan dijaring. "Nanti dari seluruh daerah itu kita jaring 6 Provinsi, 20 Kabupaten, dan 10 Walikota. Nantinya semua itu akan terpilihlah 3 Gubernur, 10 Bupati, dan 5 Walikota terbaik," ungkapnya.

Penyusunan instrumen dan indikator penilaian dibuat program khusus berkaitan dengan kajian kelitbang yang akan menghasilkan keluarannya Permendagri serta akan disosialisasikan terlebih dahulu.

Program ini, nantinya akan dibarengi dengan program Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri dalam *Innovation Award*, bagi daerah yang berinovasi. "Kita berharap pemberian penghargaan ini akan terlaksana pada November 2017 mendatang yang langsung diberikan dari Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan tidak melenceng dari jadwal yang sudah ditulis," tandasnya.

Program *leadership award* ini tidak hanya bertujuan memberikan semangat dan cerminan Kepala Daerah yang lain, tapi juga akan memetakan mana saja Kepala Daerah yang mempunyai peringkat tertinggi dan seterusnya. "Permasalahan *kan*, selama ini saat Pilkada, Kepala Daerah dipilih bukan dari kebutuhan yang lahir dari masyarakat, tapi dari popler media, pencitraan, dan sebagainya. *Nah*, kita mau lihat bagaimana sebenarnya," jelas Syabnikmat.

### Indikator penilaian

Sementara itu, Kepala Bidang Otda Pusat Litbang tersebut, Heriandi Roni mengaku, saat ini pihaknya tengah merumuskan apa saja indikator penilaian *leadership award* ini. Tapi ia dan tim, sudah mempunyai beberapa gambaran yang akan menjadi indikator penilaian bersama beberapa narasumber lainnya sebagai tim penilai, dari Kemenpan RB, Bappenas, Dirjen Otda Kemendagri, BPS (Badan Pusat Statistik), serta pakar dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), UGM (Universitas Gajah Mada), UI (Universitas Indonesia), CSIS (Centre for Strategic and International Studies), KPPOD (Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah), LKBN-Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional), TII (Transparancy International Indonesia), dan Yayasan Bung Hatta.

Menurut Syabnikmat rencana penilaiannya adalah berupa kapabilitas, yang meliputi abilitas (kemampuan): ketahanan fisik dan mental, kompetensi teknis tentang bidang pekerjaan, cepat memahami, dan menyelesaikan permasalahan.

Lalu ada kapasitas yang meliputi indikator berorientasi perubahan, berorientasi kinerja, dan tingkat pendidikan.

Lalu integritas, akan dinilai indikator kejujuran, teguh pada prinsip kebenaran, dan ikhlas dalam bekerja. "Kemudian ada akseptabilitas, kompatibilitas, dan inovatif. Tidak kalah pentingnya akan mendalami kredibilitas dan reputasi yang berupa rekam jejak dan nama baiknya. Selain itu, penilaian juga mencakup perihal kedisiplinan, etika, keteladanan, dan cepat mengambil keputusan, serta pembagian tugas dan mengawasi pelaksanaan tugas. Draft penilaian ini akan kita dirundingkan lagi pada juri, kira-kira mana yang akan dipilih, dikurangi atau bahkan ditambahkan. Intinya, kita berharap program ini bisa menjadi *pilot project* langkah awal untuk mencari pemimpin daerah yang dibutuhkan masyarakat," tegasnya. (IFR)



Program *Leadership Award* ini tidak hanya bertujuan memberikan semangat dan cerminan kepala daerah yang lain, tapi juga akan memetakan peringkat kepala daerah

Puslitbang Inovasi Daerah

# MEMASUKI TAHAP PEREKAYASAAN REPLIKASI

Pusat Inovasi Daerah BPP Kemendagri sudah memasuki tahap perekayasaan replikasi inovasi untuk Kabupaten Lebak dan Musi Rawas. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Inovasi Daerah, Rochayati Basra.

Program replikasi inovasi ini merupakan salah satu program besar inovasi daerah. Nantinya daerah yang sudah berhasil berinovasi akan direplikasikan pada daerah yang tertinggal. *Nah*, pada program kali ini, Pusat Inovasi Daerah BPP memfokuskan pada bidang pelayanan perizinan. "Dalam model inovasi pelayanan perizinan ini, kami melihat Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen sudah cukup maju. Mereka sudah berbasis *online*, dan ini yang mau coba kita terapkan di Kabupaten Lebak dan Musi Rawas," terangnya.

Sekilas mengenai inovasi pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali dan Sragen, mereka memang sudah berbasis *online* dan cepat. Untuk Kabupaten Sragen sendiri bahkan sudah dilengkapi dengan *tracking document* yang dapat dilacak sejauh mana berkas perizinan yang diajukan warga. "Warga Sragen yang sudah mengajukan berkas perizinan dapat melihatnya di portal [bptpm.sragenkab.go.id](http://bptpm.sragenkab.go.id), jadi tidak ada lagi warga yang bertanya-tanya berkasnya sudah sampai mana," terang Rochayati.

Sementara untuk Kabupaten Boyolali, di bawah DPMPPTSP (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu) justru lebih lengkap lagi dengan mengakar pada Kecamatan, dengan adanya PATEN *online* (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). "Sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), maka penduduk yang mau mengajukan izin, baik izin usaha, izin bangunan tidak perlu jauh-jauh datang ke kabupaten, bisa mengurus di kecamatan masing-masing secara *online*," jelasnya.

### Tahap rekayasa Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan menjadi kabupaten terpilih yang akan menjadi model penerapan replikasi inovasi pelayanan perizinan yang sudah diadopsi terlebih dahulu



di Kabupaten Sragen dan Boyolali. Saat Media BPP mewawancarai Adi Suhendra, salah satu peneliti di Pusat Inovasi Daerah pada akhir Maret lalu, program ini sudah mencapai tahap perekayasaan, yakni mengidentifikasi permasalahan pada obyek replikasi (Musi Rawas dan Lebak) dan menyesuaikan karakter pada model yang sudah maju.

"Pada 22-25 Maret lalu kami melakukan perjalanan dinas ke Musi Rawas, di sana kami menjaring data dan mendengar masukan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Kami juga melakukan FGD (*Focused Group Discussion*) dan observasi lapangan. Di sana kami diterima dengan baik, dan mereka menandatangani dokumen kesediaan Kabupaten Musi Rawas untuk menjadi model hasil inovasi daerah di bidang perizinan pada daerah tertinggal 2017 oleh Bupati Musi Rawas H. Hendra pada acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabupaten Musi Rawas juga menyepakati kerja sama dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan (*joint research*) terkait pelayanan perizinan. "Nah, yang menarik di Musi Rawas pada 2016 menangani lebih dari 23 jenis izin, dari sebelumnya pada 2015 hanya menangani 9 jenis perizinan. Itu berarti kebutuhan dan masyarakat semakin meningkat. 23

perizinan itu di antaranya perizinan perindustrian, perizinan kesehatan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), izin gangguan (HO), dll," terangnya.

Dari 23 jenis perizinan tersebut, Rochayati juga menambahkan hingga saat ini, DPMPPTSP Kabupaten Musi Rawas masih memiliki kendala pencatatan izin, yakni masih dilakukan secara manual, belum adanya *database* yang baik, terbatasnya akses internet, minimnya informasi dan sosialisasi mengenai mekanisme perizinan, serta belum semua SKPD memberikan kewenangan pelayanan perizinan kepada DPMPPTSP. "Kami berharap nanti ini bisa disesuaikan dengan pelayanan perizinan di Kabupaten Sragen dan Boyolali. Nanti kita lihat mana yang paling sesuai dengan Musi Rawas," terangnya.

Setelah melakukan penjarangan data dan observasi, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas didampingi BPP Kemendagri akan mendatangi Sragen dan Boyolali untuk masuk dalam tahap penerapan replikasi. Mereka akan dilatih dan diajarkan secara intensif agar masalah perizinan tidak lagi mengalami kendala. "Sejauh ini model inovasi pelayanan perizinan berupa aplikasi *online* Kabupaten Sragen dan Boyolali disepakati sebagai inovasi yang akan diterapkan pada DPMPPTSP di Kabupaten Musi Rawas. Nantinya, kita juga akan mencoba menerapkan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten



Musi Rawas. Tentunya, kami berharap dukungan dan doa dari kawan-kawan semua agar program ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses," jelasnya.

**Rekayasa di Kabupaten Lebak**

Sementara itu, *progress report* replikasi inovasi di Kabupaten Lebak, Banten juga sudah memasuki tahap perekayasaan. Menurut Rochayati, di antara Musi Rawas dan Lebak, keduanya mempunyai ciri khas dan permasalahan yang berbeda. "Kalau di Banten itu didominasi oleh hutan, jadi pelayanan perizinannya di bidang tambang dan hasil hutan yang paling laris, sementara di Kabu-

paten Musi Rawas yang paling laris pelayanan di bidang perdagangan karena mayoritas penduduknya adalah petani," jelasnya.

Sama halnya seperti di Kabupaten Musi Rawas, masalah perizinan di Kabupaten Lebak juga terkait pelayanan teknis seperti kurangnya akses internet, belum adanya *database*, dan belum adanya informasi dan sosialisasi mengenai mekanis perizinan. "Di sana, penduduknya sangat lekat dengan budaya luhur yang masih kental. Jadi kebanyakan mereka tidak tahu dan tidak mau mengurus masalah perizinan, dan di situlah tantangan kami untuk menjelaskan pada masyarakat akan pentingnya perizinan," tuturnya

dengan semangat.

Secara menyeluruh Rochayati juga berharap semua pihak yang sudah setuju diterapkan model replikasi inovasi daerah agar mendukung kegiatan dan program ini secara total. "Demi kemajuan dan cita-cita Nawacita Presiden Joko Widodo, tentu saya dan segenap Pusat Inovasi Daerah BPP Kemendagri berharap program ini berlangsung secara sukses. Sejauh ini dukungan dan peran beberapa pihak berlangsung cukup, meski anggarannya kecil, kita tetap semangat membangun lembaga dan cita-cita bangsa," katanya mengakhiri pembicaraan. (IFR)

Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan

**FOKUS PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**P**usat Adminstrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan pada Tahun 2017 ini, berencana akan fokus pada program administrasi kependudukan.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan, Subiyono mengatakan: "ada tiga bidang di bawah pusat penelitian yang dipimpinnya, yakni Bidang Administrasi Kewilayahan, Bidang Pemerintahan Desa, dan Bidang Kependudukan & Catatan Sipil". Dari ketiga bidang tersebut, nantinya akan menghasilkan beberapa rekomendasi kajian untuk Menteri Dalam Negeri. "Target kami, ada beberapa rekomendasi untuk Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan pengkajian bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil. Semua program itu tergantung dari per-

mintaan Menteri sendiri sesuai masing-masing bidang dalam Puslitbang ini," jelasnya

Fokus kerja saat ini ialah terkait dengan bagaimana merumuskan model inovasi pelayanan akta kelahiran yang cepat, murah dan aman, yang sesuai dengan karakteristik daerah. Pada tahap awal, Subiyono akan mencoba memetakan dengan melakukan indentifikasi dan inventarisasi berbagai model pelayanan akta kelahiran di daerah. Dari sini, ia mencoba mengambil sampel beberapa daerah yang pelayanan akta kelahirannya sudah maju, sedang berkembang, dan daerah tertinggal/rentan. Setelah itu, baru dilakukan perekayasaan model dan diujicobakan untuk penerapannya.

Semua program itu tergantung dari permintaan Menteri sendiri sesuai masing-masing bidang dalam pusat ini

"Pastinya nanti kita juga akan evaluasi penerapan model

inovasi tersebut, apakah berhasil atau belum. Kalau belum kita cari tahu apa faktor penyebabnya. Hasil keseluruhannya ini yang akan kami berikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri," jelasnya.

Selain fokus pada kajian administrasi kependudukan, pusatnya juga akan mengkaji terkait pertumbuhan ekonomi di perkotaan, serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. "Lalu nanti ada juga beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengkajian kompetitif Bidang Administrasi Kewilayahan dan Bidang Pemerintahan Desa dan Bidang Kependudukan" tambahnya.

Dia berharap seluruh program yang sudah dicanangkan secara terstruktur dan matang ini, dapat teralisasi sepenuhnya guna bahan refrensi kebijakan yang akan diambil oleh Mendagri. "Targetnya akhir 2017 sudah selesai semua. Kita doakan saja nanti supaya semuanya berjalan dengan lancar," tutupnya. (IFR)

Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah

**SEMPURNAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SAP BERBASIS AKRUAL**

**S**elain mempunyai program nasional model pembiayaan penyelenggaraan pilkada yang efisien. Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri juga mempunyai sejumlah program kajian yang menarik dan penting untuk membangun daerah terutama dalam pengelolaan keuangan.

Melalui Bidang Keuangan Daerah, Mercy Pasande selaku Kepala Bidang tersebut menuturkan, pihaknya sedang melakukan kajian penerapan SAP (Standar Akutansi Pemerintahan) berbasis akrual di seluruh daerah. SAP berbasis akrual ini sebenarnya mulai sejak 2015 lalu dengan terbitnya PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah yang kemudian direvisi menjadi PP No 71 tahun 2010 dan disempurnakan Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Cara ini merupakan peng-*auditan* data transaksi ekonomi untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Mercy menjelaskan, SAP berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber

daya dicatat.

"Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang

bahnya.

Namun sayangnya belum semua daerah mampu menerapkan laporan keuangan sesuai ketentuan SAP berbasis akrual itu. Menurut Mercy ada beberapa faktor yang memengaruhi. Di antaranya adalah belum semua Pemda dapat menerapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi dan belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap/Barang Milik Daerah (BMD)

Atau faktor lain ia menjelaskan, bisa saja karena faktor kekurangan SDM-nya (Sumber Daya Manusia) pada SKPD dan satuan kerja pengelola keuangan daerah yang memahami akutansi. hal ini sangat terkait dengan penataan personil pada tempat yang tepat (*on the right place*). "Karena untuk membuat laporan keuangan dibutuhkan kualifikasi khusus yang memahami akutansi. Selain itu, orang yang sudah terbiasa dan paham semestinya tidak digeser ke posisi atau jabatan lain. Butuh waktu lama untuk mengajari SDM yang baru. Kebanyakan jika orang itu *di-rolling*, tidak meninggalkan ilmu pada penggantinya," terangnya.

Hal itulah yang menjadi *pilot project* kerja Mercy dan tim untuk memetakan permasalahan SAP berbasis akrual di beberapa daerah. Dirinya berharap dapat menyusun rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan penyempurnaan kebijakan SAP berbasis akrual di daerah. "Penerapan SAP dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi para *stakeholder*, baik pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan. Jadi kita berharap SAP berbasis akrual ini diterapkan di semua daerah," tutupnya. (IFR)

Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya

sebenarnya," jelas Mercy.

**Memetakan daerah**

Untuk itu, sebenarnya pemerintah telah membuat aplikasi SAP akrual dan menyosialisasikan ke semua daerah. "Jadi mereka tinggal memasukkan data saja sebenarnya," tam-



LAPORAN UTAMA

# RAKORNAS KELITBANGAN 2017

KOTA CANTIK, PALANGKA RAYA TERPILIH MENJADI TUAN RUMAH PERHELATAN AKBAR RAKORNAS (RAPAT KOORDINASI NASIONAL KELITBANGAN) 2017. SELURUH PESERTA DARI SABANG SAMPAI MARAUKE BERKUMPUL DI KOTA CANTIK ITU SAMBIL MERUMUSKAN SOLUSI KELITBANGAN SELAMA INI. LANTAS SEPERTI APA DAN BAGAIMANA KEGIATAN RUTIN TAHUNAN TERSEBUT?



# Solusi Masalah BPP Daerah

**R**abu petang tepatnya pada 15 Maret 2017, BPP Kemendagri kembali menggelar pertemuan nasional Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) seluruh daerah di Indonesia. Undangan yang diprediksikan akan dihadiri sekira 500 peserta itu ternyata melebihi kapasitas. Hampir 800 peserta yang datang membawa rombongan setiap daerah.

Hal itulah yang ditanggapi langsung oleh Plt. Sekretaris BPP Kemendagri dalam kata sambutan pembukaan Rakornas 2017. “Sebenarnya daya tampung *ballroom* ini sebanyak 250 orang, kami sangat berterima kasih atas kehadiran para peserta yang begitu antusias dalam pertemuan kali ini,” kata Subiyono di Swiss-Belhotel Internasional Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Mengambil Tema “Peran Strategis Perangkat Penelitian dan Pengembangan Sebagai Poros Perumus Kebijakan Dalam Mendorong Inovasi Daerah” Subiyono berharap Rakornas 2017 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada tahun sebelumnya membahas tema Kemaritiman sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang ingin menghidupkan potensi Maritim di Indonesia, kali ini tema Rakornas lebih dititik beratkan pada permasalahan BPP Daerah selama ini. Terutama sejak dikeluarkannya Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri yang belum semua BPP Daerah mengenal dan memahaminya.

Selain itu, sebagai induk dari Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah, dalam pertemuan ini BPP

Kemendagri juga akan mengevaluasi penerapan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sejak dikeluarkannya PP No 18 Tahun 2016 tentang OPD. “Semoga pertemuan ini dapat mewujudkan fungsi BPP Daerah sebagai lembaga *think tank* dan poros penelitian di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Bi itu.

Tema tersebut juga disambut hangat oleh pemerintah provinsi tuan rumah Rakornas 2017, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Syahrin Daulay, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi tema yang diambil oleh BPP Kemendagri sebagai ajang silaturahmi sekaligus peningkatkan kualitas penelitian di daerah.

“Kami menyambut baik kegiatan ini, karena selain sebagai ajang silaturahmi tema Rakornas kali ini dilandasi fakta dan potensi beragam dari berbagai daerah. Maka kita harus dorong peran BPP sesuai dengan karakteristik dari masing-masing daerah,” ucapnya.

Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia juga mengatakan hal yang senada. Kegiatan Rakornas ini sangat penting bagi setiap daerah sebagai lembaga resmi penelitian di daerah. “Ini menjadi sangat penting, karena setiap mengambil langkah kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan setiap daerah harus melalui penelitian dan pengembangan. Jadi bukan dari latar belakang emosional dan ego sektoral semata,” tandasnya.

Kebijakan tersebut nantinya akan berpengaruh besar pada tiap-tiap daerah, karena



menurut Riban kebijakan tidak hanya berlaku untuk satu atau dua tahun ke depan tetapi lebih luas dengan jangka waktu panjang. “Acara Rakornas Kelitbangan ini merupakan langkah awal untuk mencapai penelitian yang matang. Kita bisa belajar bagaimana mengelola SDA (Sumber Daya Alam) yang ada, agar kita bisa menjadi kota yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya,” jelasnya.

## Sharing pengetahuan

Selama tiga hari berturut dari 15-17 Maret 2017 seluruh peserta mengikuti pemaparan materi dari narasumber yang telah disiapkan oleh BPP Kemendagri. Narasumber yang dipilih merupakan narasumber ahli yang memahami segala permasalahan kelitbangan selama ini. Seperti Husein Avicenna Akil dari LIPI yang membahas masalah sumber daya peneliti di BPP seluruh Indonesia, Sumule Tumbo dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang berbagi pengalaman terkait pengelolaan belanja daerah, dan ada dari pihak KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang membahas mengenai potensi inovasi perhutanan di Indonesia. Permasalahan tersebutlah, baik internal BPP Kemendagri dan juga isu terhangat inovasi daerah yang selama pertemuan akbar tersebut menjadi pusat perhatian peserta.

Seperti masalah sumber daya peneliti. Husein Avicenna Akil menjelaskan seputar arah kebijakan dan strategi peningka-

tan profesionalisme jabatan peneliti. “Dari segi kuantitas Indonesia sangat jauh sekali jumlah SDM penelitiannya. Hanya sekira 90 peneliti per 1 juta penduduk atau sekira 22 ribu dari 250 juta penduduk Indonesia,” ungkapnya.

Untuk itu, Avicenna menyarankan agar BPP menambah SDM penelitiannya dengan merangkul LIPI sebagai pembina jabatan fungsional peneliti dalam memfasilitasi dan penilaian angka kredit peneliti nasional. “Jadi pengangkatan peneliti dari fungsional umum, perpindahan dari struktural ke fungsional peneliti, atau ada penambahan dari fungsional serumpun seperti dosen dan perekayasa yang mau menjadi SDM peneliti Litbang, itu berbeda penilaiannya,” terangnya.

Perbedaan itu menurutnya, dari segi pendidikan, wajib atau tidaknya diklat tingkat pertama, batas usia, dan unsur penunjang lainnya. “Kalau dari fungsional umum pendidikan minimal S1 dengan wajib mengikuti diklat pertama dan batas usianya maksimal 45 tahun, sedangkan perpindahan dari struktural atau fungsional lain pendidikan minimal S2 wajib mengikuti diklat dan batas usia maksimal 45 tahun, sementara untuk perpindahan dari dosen atau perekayasa pendidikan minimal S2 dan tidak wajib mengikuti diklat pendidikan serta usia minimal mencapai 4 tahun sebelum batas usia pensiun,” katanya.

Setelah memunyai kandidat untuk menambah SDM peneliti, instansi yang bersangkutan (BPP) mengajukan

ke LIPI agar Pusbindiklat dapat membentuk tim penilai dan melaksanakan uji kompetensi. “Setiap jenjang peneliti punya kriterianya masing-masing. Tentu berbeda penilaian untuk peneliti pertama, peneliti muda, peneliti madya, dan peneliti utama,” tambah.

Selain itu, lanjut Avicenna, diklat fungsional peneliti pun ada tingkatannya, yakni tingkat pertama dan tingkat lanjutan. “Untuk itu materi yang diberikan pun berbeda, begitu pula persyaratannya,” jelasnya.

Dalam forum yang sangat terbatas waktunya itu, sebenarnya para peserta sangat antusias dan ingin memperdalam ilmunya mengenai dunia penelitian, terutama untuk BPP Daerah yang baru saja terbentuk. Namun sayangnya, moderator meminta Avicenna untuk mempersingkat waktu dan bergiliran memaparkan materi dengan narasumber lainnya. Narasumber selanjutnya pun kemudian berbicara. Kali ini, BPP Kemendagri menghadirkan Sumule Tumbo, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III yang akan memaparkan bagaimana mengelola program dan anggaran kegiatan kelitbangan dalam mendukung kebijakan prioritas pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan itu, Sumule juga memaparkan bagaimana siklus pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan. Setidaknya ada lima tahap yang harus diperhatikan para pejabat BPP Daerah, yakni tahap pertama ialah perencanaan. Pada tahap ini SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) harus membuat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang mengacu pada Renja (Rencana Kerja) SKPD tahunan, Renstra (Rencana Strategis) SKPD 5 tahunan, dan pedoman RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) 5 tahunan dan RPJPD (Rencana Program Jangka Panjang Daerah) 20 tahun serta memerhatikan RPJPN dan RPJMN (Nasional) dan Renstra dan Renja K/L terkait.

Kemudian RKPD dibahas bersama DPRD dalam bentuk KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas & Plafon Anggaran Sementara) untuk membentuk RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). “Pada prinsipnya semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. Hanya saja pendapatan secara bruto, jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya,” terangnya.

Paling tidak, Sumule menyarankan dalam perencanaan anggaran SKPD harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, serta disesuaikan dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) SKPD dan urusan yang menjadi kewenangan daerah. “Dan yang paling penting lainnya adalah taati jadwal sesuai dengan tahapan penyusunan APBD,” tandasnya. (IFR)

Setiap mengambil langkah kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan setiap daerah harus melalui penelitian dan pengembangan. Jadi bukan dari latar belakang emosional dan ego sektoral semata

# Babak Baru BPP Daerah

Rapat Koordinasi Nasional yang rutin diselenggarakan induk BPP Daerah, yakni BPP Kemendagri tidak hanya menyajikan beberapa narasumber ahli untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait pengelolaan peneliti dan anggaran penelitian. Tetapi selalu menelorkan gagasan dan ide baru sebagai langkah awal BPP Daerah dalam semangat memajukan penelitian di daerah.

**S**eperti biasa, dalam perhelatan akbar yang ringkas itu, BPP Kemendagri memberikan ruang lebih luas dalam berdiskusi pertemuan pejabat penelitian dan pengembangan seluruh Indonesia itu dalam pembagian komisi. Ada tiga komisi yang dipimpin oleh Kepala Pusat BPP Kemendagri dan satu perwakilan BPP Daerah yang hadir. Panitia penyelenggara Rakornas (Bagian PJKSE BPP Kemendagri) sudah mengatur demikian rupa setiap peserta mendapatkan porsi yang pas sesuai dengan karakteristik masing-masing BPP Daerah. Misalnya, setiap BPP Daerah yang membawa 2-3 perwakilan disebar di tiap komisi agar hasil yang sudah didapat secara intens bisa dibawa pulang ke daerahnya masing-masing, meskipun di akhir acara semua hasil rapat komisi akan dipaparkan secara bersama-sama.

Komisi I membahas mengenai Kelembagaan dan SDM pasca diterapkannya PP No 18 Tahun 2016 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah), solusi dan permasalahannya. Lalu di Komisi II membahas mengenai Inovasi Daerah dan Kehutanan menanggapi RPP Inovasi Daerah yang akan disahkan dalam waktu dekat ini, dan terakhir ada Komisi III yang membahas mengenai Program dan Kegiatan Strategis masalah dan solusi sejak dikeluarkannya Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

## Hasil Rakornas Kelitbang 2017

Dalam sidang per komisi yang dimulai pukul 14.00 – 18.00 WIB, banyak

peserta yang aktif dan berpartisipasi mengungkapkan pendapatnya. Mereka banyak yang mengalami kendala sejak diberlakukannya PP No 18 Tahun 2016 tentang OPD. “Pembentukan BPP Daerah pada dasarnya banyak yang tidak sesuai dengan pengaturan dalam PP 18 tentang OPD sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait implementasi PP tersebut khususnya perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan,” ujar Aryati Puspasari Abady Ketua Komisi I.

Seluruh pendapat dan aspirasi yang masuk dari setiap komisi ditampung dan dicarikan jalan keluar permasalahannya. Dalam sidang Komisi I, paling tidak menghasilkan 6 poin penting terkait permasalahan pasca diterapkannya PP tentang OPD. “Yang pertama, penting bagi kami untuk melakukan evaluasi kembali PP tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan BPP Daerah. Lalu yang kedua, penyelenggaraan kelitbang yang diatur dalam Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri perlu direvisi dan mengikutsertakan BPP Daerah dalam peresvisian, paling tidak 2 minggu setelah acara Rakornas ini,” tandasnya.

Perevisian Permendagri No 17 tentang Pedoman Litbang di Lingkup Kemendagri itu harus disesuaikan dengan PMK 106 tentang SBK (Standar Biaya Keluaran) dan Permen Ristek Dikti 69 Tahun 2017 tentang Komitmen Reviewer, hal tersebutlah yang selanjutnya menjadi poin pokok ke-3 dari hasil Sidang Komisi I Rakornas 2017.



“Hal ini dirasa perlu, karena selama melakukan penelitian BPP Daerah juga tidak bisa lepas dari Kemendagri, dan aturan PMK tentang SBK ini juga akan memengaruhi pengelolaan program dan anggaran di daerah,” jelasnya.

Selanjutnya pada poin ke-4, masih terkait PP tentang OPD yang berdampak pada kekurangan SDM. Baik itu BPP yang baru terbentuk atau justru perampangan SKPD yang menjadikan BPP berada di bawah naungan Bappeda (Badan Pembangunan Daerah). “Sebagai tindak lanjut PP tentang OPD dan Permenpan RB No 26 Tahun 2016 tentang *inpassing* Pegawai Negeri Sipil, maka BPP Kemendagri perlu memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional peneliti, perekayasa, perancang peraturan perundang-undangan, dan analisis kebijakan,” katanya.

Selain permasalahan di atas, BPP Daerah juga berharap BPP Kemendagri perlu menindaklanjuti dan memfasilitasi pangkalan data kelitbang lingkup BPP Kemendagri dan BPP Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna memudahkan dan menunjang peran penelitian dan pengembangan di daerah. “Semua itu di point terakhir, BPP Kemendagri harus membentuk konsolidasi dalam

peningkatan lembaga BPP Daerah melalui sinergi kelembagaan di tingkat pemerintah pusat. Kami berharap bisa seperti itu,” katanya.

Dari 6 hasil Komisi I tersebut, seluruh peserta perwakilan menandatangani dan menyetujui kesepakatan komisinya untuk dipaparkan di pengujiung acara.

Sementara itu, di tempat yang berbeda, Komisi II yang diwakili oleh Kepala Pusat Inovasi Daerah, Rochayati Basra dan Reti Wafda (Ketua Komisi II) membahas mengenai wacana terbentuknya PP Inovasi Daerah yang sebentar lagi akan disahkan. Hampir sebagian besar BPP Daerah belum memahami bagaimana isi draft RPP yang merupakan angin segar dari kemajuan inovasi daerah itu. Tapi mayoritas BPP Daerah menyambut baik PP tersebut dan berharap Pemerintah Pusat betul-betul mengayomi kebutuhan daerah dan melakukan perlindungan hukum pada daerah yang inovatif.

Setidaknya ada 4 poin penting dalam sidang Komisi II tersebut. Poin pertama, terkait PP Inovasi Daerah, peserta sepakat agar segera ditandatangani RPP Inovasi Daerah oleh Presiden dan membentuk penguatan tim koordinasi inovasi daerah sehingga dapat disosialisasikan dengan baik apa dan bagaimana penyusunan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk PP tentang Inovasi Daerah. “Nanti kan dalam PP ini kita akan mengadakan pemetaan inovasi daerah, replikasi inovasi yang saat ini sudah berjalan, dan perlindungan hukum bagi daerah yang inovatif, sehingga perlu adanya persamaan persepsi kepada semua lembaga, baik itu melalui sosialisasi ke BPP Daerah, maupun lembaga pemeriksaan dan pengawasan daerah terkait perlindungan hukum ini,” jelas Rochayati.

Untuk memperkuat itu semua, pada poin ke-2 Rochayati menjelaskan perlu adanya penguatan peran BPP Daerah dalam mendukung inovasi di daerah. Seperti optimalisasi pelaksanaan Tupoksi BPP Daerah melalui Pusat Inovasi Daerah, atau studi lanjut, pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM yang terkait dengan inovasi.

“Lalu pada poin ke-3 kami juga sudah menuliskan rencana aksi dan strategi percepatan pelaksanaan inovasi, seperti penyusunan peta jalan tentang kegiatan inovasi daerah, peningkatan program dan kegiatan yang bersifat inovatif, penyiapan laboratorium inovasi daerah, konsolidasi, kerja sama, dan evaluasi dengan lintas K/L (Kementerian/Lembaga), pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah dan DPRD yang baru terpilih, kerja sama dengan negara lain atau mitra LSM dan per-

guruan tinggi, bila perlu peningkatan jumlah peneliti terkait bidang inovasi dan pameran tunggal hasil inovasi daerah,” terangnya.

Selain masalah penguatan inovasi daerah yang berhubungan dengan segeranya terbentuk PP Inovasi Daerah, Palangka Raya, sebagai tuan rumah Rakornas tahun ini juga mempertanyakan bagaimana pemanfaatan potensi kehutanan berbasis kearifan lokal terkait inovasi ini. Dalam Sidang Komisi II akhirnya menjelaskan tentang pemanfaatan hutan sebagai ekowisata kehutanan berbasis inovasi daerah. Menurut Rochayati paling tidak ada *pilot project* untuk pengembangan inovasi ekonomi berbasis kearifan lokal yang terintegrasi.

“Paling tidak kita perlu adanya pembukaan akses untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan ecowisata kehutanan, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kehutanan, peningkatan kegiatan kelitbang dan inovasi di bidang kehutanan, peningkatan peran masyarakat dan kegiatan kelitbang inovasi melalui kearifan lokal di bidang kehutanan,” jelasnya.

Seluruh peserta yang hadir setuju sambil menyahuti Rochayati yang memimpin rapat dan berkata. “Bagaimana bapak/ibu bungkus?” tanyanya.



“Bungkus!” sahut peserta.

Selain Komisi I dan II, ditempat yang hanya disekat oleh papan *ballroom* hotel itu Komisi III membahas hal lebih krusial terkait Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan. Komisi ini terhitung paling lama rapat dari komisi yang lain karena BPP Daerah yang baru terbentuk belum semuanya paham dan membaca Permendagri tersebut.

Dalam Sidang Komisi III ini, setidaknya ada 4 poin dari hasil sidang komisi ini. Pertama terkait implementasi Permendagri tersebut, forum menyepakati adanya sosialisasi Permendagri terutama dalam pengorganisasian, tahapan dan jangka waktu, dan lampiran dalam Permendagri. Forum yang dipimpin Muhammad Firda, Kepala BPP dari Provinsi Sulawesi Selatan itu menampung segala aspirasi terkait Permendagri tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan. “Perlu adanya revisi dan penyempurnaan tersebut dengan PMK No 106 Tahun 2016 tentang SBK dan Permenristek No 69 Tahun 2016 tentang Komitment Reviewer yang simplifikasi tahapan kegiatan kelitbangan harus tetap memperhatikan kualitas keluaran dari setiap kegiatan kelitbangan,” jelasnya.

Selanjutnya pada poin ke-2, perencanaan dan pelaksanaan program penyusunan kelitbangan harus *out of the box* dengan membuat program prioritas kelitbangan daerah yang menyesuaikan dengan pagu anggaran dan mendorong kolaborasi pemanfaatan hasil kelitbangan yang sudah

BPP Kemendagri wajib mengoordinasikan apa yang telah disepakati dalam Rakornas ini, khususnya terkait dengan implementasi Permendagri No 17 tahun 2016 yang berdampak pula pada perlunya penguatan kapasitas SDM kelitbangan, serta mendorong hasil-hasil kelitbangan yang berorientasi pada inovasi daerah.

dilakukan oleh institusi kelitbangan lainnya. “BPP Daerah agar segera menyusun RIK (Rencana Induk Kelitbangan). Sejalan dengan itu, BPP Kemendagri diharapkan segera merampungkan RIK untuk menjadi acuan bagi perangkat BPP Daerah,” terangnya.

Lalu pada poin ke-3 mengenai standar dan struktur penganggaran kelitbangan, forum menyepakati BPP Kemendagri harus memfasilitasi alokasi anggaran kelitbangan di daerah agar memicu daya saing kelembagaan Litbang yang berdampak pada peningkatan dukungan pendanaan. “Perlu adanya penegasan terkait besaran minimal penganggaran kegiatan kelitbangan sebesar 1% dari alokasi APBD yang ditegaskan di dalam usulan revisi Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan. Selain itu, perlu adanya pelaksanaan kegiatan kelitbangan satu pintu (oleh BPP Daerah) dan *cost sharing* antara pusat dan daerah dalam peningkatan kapasitas SDM dan pelaksanaan kelitbangan,” jelasnya.

Dan yang terakhir, poin ke-4 mengenai topik kelitbangan strategis dan potensi kolaborasi kelitbangan terutama masalah implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Kita perlu kajian kolaborasi kajian nasional terkait pengelolaan dana dan pengaruh dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.

#### Di pengujung acara

Selesai rapat komisi, seluruh peserta memaparkan semua hasil sidang komisinya. Dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris BPP, Subiyono, secara umum membacakan bahwa ada beberapa hasil rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti baik oleh BPP Kemendagri maupun perangkat BPP Daerah.

“Pertama, untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan lintas pemangku kepentingan, BPP harus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi terbaik mengenai, evaluasi implementasi PP No 18 Tahun 2016 mengenai pembentukan kelembagaan litbang daerah, *inpassing* Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam PermenPAN-RB No 26 Tahun 2016, penetapan RPP tentang Inovasi Daerah, dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam penguatan lembaga litbang daerah dan upaya untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah di seluruh wilayah Indonesia,”

kata Subiyono.

Sementara itu, untuk hal-hal yang bersifat penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, program dan inovasi daerah, BPP Kemendagri tetap berkomitmen untuk mendorong penguatan kapasitas tersebut, baik melalui kegiatan-kegiatan yang didukung oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan sumber-sumber lainnya. Atau yang dilakukan oleh daerah melalui pendanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Kegiatan yang akan dilakukan dapat berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat koordinasi, konsultasi, dan sebagainya.

“Selain itu, terkait dengan langkah-langkah penyempurnaan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah, akan dilakukan pencermatan lebih lanjut dengan regulasi terkait lainnya seperti PMK No 106 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No 69 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Keluaran, sekaligus mengakomodasi masukan daerah dalam sidang komisi,” tambah Subiyono.

Untuk itu, BPP Kemendagri wajib mengoordinasikan apa yang telah disepakati dalam Rakornas ini, khususnya terkait dengan implementasi Permendagri No 17 tahun 2016 yang berdampak pula pada perlunya penguatan kapasitas SDM kelitbangan, serta mendorong hasil-hasil kelitbangan yang berorientasi pada inovasi daerah.

Namun demikian, terdapat pula beberapa rekomendasi yang menjadi komitmen bersama yang telah disepakati dalam masing-masing sidang komisi.

Subiyono mengatakan, beberapa rekomendasi itu seperti di antaranya, pembangunan basis data pusat dan daerah melalui pemetaan maupun aplikasi terkait kegiatan kelitbangan dan inovasi, kolaborasi pelaksanaan pengkajian nasional tentang isu-isu strategis nasional yang topiknya akan dibahas dalam forum tersendiri, penyusunan rencana aksi inovasi daerah, dan penyusunan rencana induk kelitbangan Kemendagri dan pemerintah daerah.

“Saya berharap ini menjadi perhatian dan komitmen kita bersama agar segera diimplementasikan sesuai dengan kewenangannya dan menciptakan BPP sebagai lembaga yang elit dan membanggakan,” tutup Subiyono. (IFR)



## Potensi Hutan dalam Konteks Penelitian

Isu kehutanan menjadi salah satu tema yang diusung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan 2017. Hal itu didasari oleh potensi hutan Indonesia sebagai salah satu unsur pembangunan bangsa. Untuk itu, BPP Kemendagri sebagai lembaga *think tank* negara senantiasa menjadi fasilitator langkah baru dalam mengkaji potensi hutan di Indonesia.

Dalam Rakornas yang diselenggarakan di Palangka Raya ini, BPP Kemendagri mengundang narasumber ahli langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyinggung masalah kehutanan.

“Hutan memunyai potensi yang besar untuk mendukung Nawacita Presiden Jokowi, khususnya untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Selain itu, hutan juga menjadi pendukung Prioritas Nasional Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. KLHK sendiri menargetkan luas hutan yang dikelola masyarakat akan meningkat menjadi 12,7 juta hektar dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan adat,” terang Henry Bastaman, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK.

Masalah kehutanan menjadi penting untuk dikaji, sebab kemiskinan dan ketimpangan pemanfaatan sumber daya hutan antara perusahaan besar dan masyarakat masih sangat besar. Dari 220 juta penduduk Indonesia, 48,8 juta orang di antaranya tinggal di perdesaan sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta termasuk kategori miskin/tertinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. “Kantong-kantong kemiskinan tersebut pada umumnya terletak di desa-desa yang memiliki interaksi tinggi terha-

dap sumber daya hutan,” jelasnya.

Selain itu, *overlay* data Potensi Desa (PODES) Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik pada 2011 menyebutkan, sebanyak 8.644 (11,07 persen) desa berada di dalam kawasan hutan, 26.353 desa (33,75 persen) desa berada di tepi hutan, dan 43.097 desa (55,19 persen) desa berada di luar kawasan hutan. “Namun sayangnya, masyarakat yang ada di dalam dan sekitar tersebut tidak sepenuhnya melakukan pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian hutan,” tambahnya.

Untuk itu, KLHK memandang perlu untuk merancang peraturan menteri yang akan mengatur kearifan lokal terkait memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat atas kearifannya dalam memanfaatkan sumber daya genetik untuk beberapa tujuan melalui penelitian.

Selain itu, isu kehutanan tersebut menjadi menarik dibincangkan lantaran tuan rumah Rakornas Kelitbangan 2017 bertepatan di daerah yang potensi hutannya melimpah, yakni Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Bukan tanpa sebab, BPP Kemendagri memilih Kota Palangka Raya sebagai tuan rumah perhelatan akbar BPP setiap tahun itu. Menurut Plt. Kepala BPP, Dody Riyadmadji Kota Palangka Raya dipilih karena berbagai faktor. Di antaranya karena potensi

Sumber Daya Alam Palangka Raya yang masih sangat melimpah.

“Mengapa Palangka Raya? Karena eksistensi hutannya masih terasa, bukan semata-mata hanya mengolah kayu dari hutan tapi ada sumber-sumber yang lain selain kayu. Ada madu yang dapat dibudidayakan dari kayu, dan yang pasti karena paru-paru dunia cadangannya ada di Indonesia. Maka merawat hutan menjadi sesuatu yg sangat penting. Sehingga ini juga yang akan menjadi salah satu tema dan pembahasan Rakornas kali ini,” kata Dodi.

Selain itu, Dodi juga menambahkan, kota Palangka Raya pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo sebagai wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya.

“Ingat pidato Jokowi yang mengatakan coba di Kota Palangka Raya kita cari lahan sekian hektar lalu bagaimana jika Ibu Kota dipindah ke sini. Dari *statment* politik itu, Litbang harus bisa mengira-ngira bagaimana potensi di sini supaya bagus, tanah supaya tidak banjir, dsb. Karena Kalteng termasuk potensi bencananya sangat minimal. Itulah alasan mengapa Kota Cantik (Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah, dan Keterbukaan) Palangka Raya jadi tuan rumah Rakornas Kelitbangan 2017,” terang Dodi. (IFR)

# YANG SUKSES DARI JUMPUN PAMBELOM

Tidak hanya cantik dan kaya akan potensi hutannya, Palangka Raya juga memunyai hutan lindung Jumpun Pambelom yang merupakan lahan gambut yang tadinya pernah kebakaran hebat pada 2014. Kini seolah bangkit dan hidup kembali, hutan itu sengaja diberi nama Jumpun Tana Pambelom yang artinya tanah sumber kehidupan.

**H**utan yang kini jadi obyek eduwisata penduduk setempat itu awal mulanya dipulihkan dan dikelola kembali oleh Januminro yang sejak Desember 2014 menjadi Koordinator relawan serbu api Jumpun Pambelom dan Ketua Lembaga Tane Ranu Dayak.

Januminro menceritakan, awal mulanya Jumpun Pambelo beroperasi sejak 1973 dan berakhir pada 1993 sejak terbukanya akses jalan lalu lintas Kalimantan, kawasan tersebut menjadi kawasan yang tidak terkelola dengan baik dan rusak akibat invasi permukaan dan pembukaan lahan. "Kawasan yang terlantar dan rusak berat. Puncaknya pada 2014 kawasan ini terbakar, dan akses air ke titik api sangat sulit," katanya.

Lalu kemudian, kawasan ini dipelihara dengan baik oleh Januminro dan tim supaya tidak terbakar dan membiarkan anakan pohon tumbuh secara alami melakukan pengayaan jenis. "Saat ini telah menjadi hutan sekunder dengan potensi jenis dan kerapatan yang cukup baik. Jumpun Pambelom telah ditumbuhi dengan berbagai jenis pohon khas rawa gambut dengan ketinggian mencapai lebih dari 25 m dan diameter batang 50 cm," ungkapnya.

Januminro percaya bahwa hutan memiliki kearifan alam yang mam-

pu merestorasi diri (mengembalikan fungsinya secara bertahap) atau dengan istilah lain suksesi alami. "Kawasan hutan gambut yang rusak dapat kembali pulih mendekati kondisi awal, dengan tetap menjaga jangan dirusak atau terbakar," tandasnya.

Untuk itu, ia memulai memulihkan fungsi Jumpun pambelom itu dengan membiarkan kawasan yang terbakar ditumbuhi semak dan belukar serta membangun sistem pertahanan api dengan menciptakan sumur bor. "Selama ini lahan hutan di Kalimantan terbakar terus menerus karena pusat air jauh untuk memadamkan apinya. Selain itu terjadi penurunan muka air akibat kanalisasi. Untuk itu kami menciptakan sumur bor di beberapa titik rawan kebakaran sedalam 20 meter. Air sumur bor ini mampu mencipratkan air dengan kekuatan besar sekaligus melalui selang, sehingga mampu meredakan api secara cepat dan aman," terang pria yang kini menjadi koordinator pemulihan hutan di beberapa provinsi lainnya.

Sumur bor itu berjarak mengelilingi kawasan hutan dengan jarak antara 100 – 150 meter dari kawasan hutan. Selain membentuk sumur bor, Janu begitu ia akrab disapa juga membentuk tim pemadam kebakaran hutan dan pembuat sumur bor yang sudah terlatih dan bisa menelorkan ilmunya ke beberapa tempat di Kalimantan bahkan provinsi lainnya.

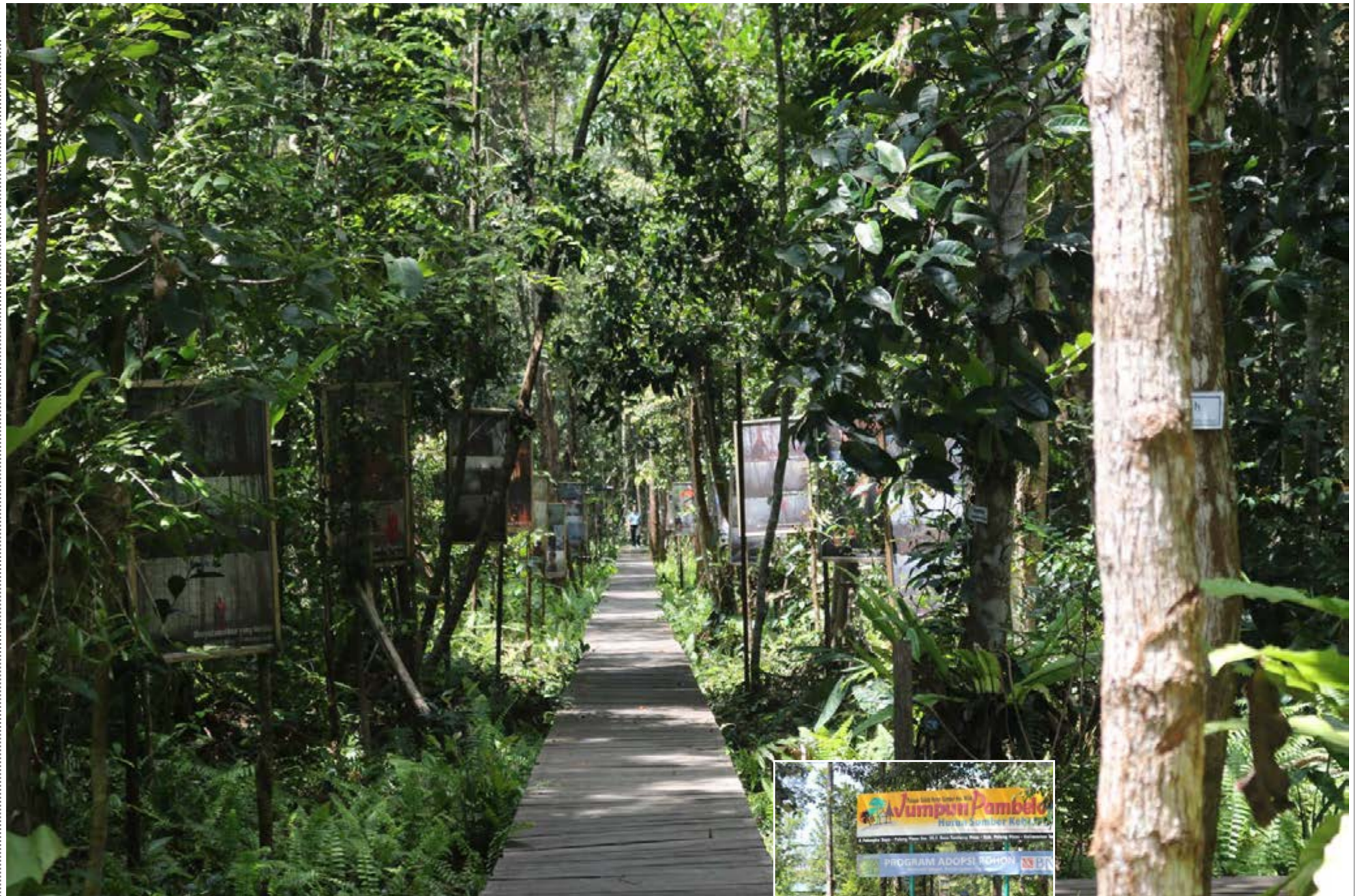
Mereka telah banyak melakukan pelatihan di Kalimantan Tengah, Riau dan Kalimantan Barat.

Jika dikalkulasikan dari segi pengeluaran, tentu hal ini jauh lebih efisien sebelum dibangunnya sumur bor. "Sebelum ada sumur bor, kita mengandalkan bantuan pemerintah pusat yang datang membawa truk tangki atau helikopter air. Kapasitasnya hanya 5.000 liter dan itu hanya cukup dalam waktu 1 jam, sementara ini airnya bersih, jangkauan tembaknya memadai, menyediakan air tanpa batas, ideal dibangun di kawasan hutan, dan responnya cepat," terangnya.

Di Kalimantan Tengah kini juga telah

dibangun *alarm* tradisional peringatan kebakaran lahan gambut dengan metode pipa air. Cara kerjanya cukup sederhana, pipa air itu diukur sebagai alat kedangkalan air gambut yang menghubungkan titik api. Pipa itu disambung dengan air raksa untuk mengatur jarum jam raksasa dalam papan yang bertanda merah (bahaya), kuning (sedang), dan hijau (aman). Alat ini bahkan serupa dengan alat yang diproduksi oleh Jepang dan dijual ke berbagai Negara potensi rawan kebakaran hutan dengan harga Rp 50 juta. "Tapi kami di sini membuatnya tidak sampai Rp 1 juta," terangnya.

Inovasi yang dilakukan Janu me-



Selama ini lahan hutan di Kalimantan terbakar terus menerus karena pusat air jauh untuk memadamkan apinya. Selain itu terjadi penurunan muka air akibat kanalisasi.

mang sudah selayaknya diberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Ia pernah menyabet Kehati Award pada 2015, Kalpataru pada 2015 dan Satyalencana Wira Karya pada 2015 atas dedikasinya pada alam dan Negara.

"Kami juga membuka seluas-luasnya posko pengaduan kebakaran hutan, bagi siapa saja yang melihat potensi kebakaran hutan bisa menghubungi nomor yang tertera dalam papan yang telah kami tempel di beberapa lokasi. Kami dengan sigap akan datang dan memadamkan api dengan sumur bor," tutupnya. (IFR)

# MEMAKSIMALKAN DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA

*Kesuksesan penyelenggaraan Rakornas Kelitbangan 2017 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah tidak terlepas dari peran tuan rumah yaitu BPP Kota Palangka Raya yang memberikan dukungan penuh. Rakornas diharapkan bisa menjadi multiplier effect bagi BPP Palangka Raya di masa mendatang.*

**D**i ranah pemerintahan Kota Palangka Raya, peran BPP Palangka Raya belum terlalu kentara. Pasalnya lembaga tersebut masih terbilang baru. BPP Palangka Raya baru berdiri dua tahun lalu dengan penuh keterbatasan. Rakornas 2017 adalah salah satu *event* tahunan yang sukses diselenggarakan BPP Kemendagri berkat dukungan tuan rumah BPP Palangka Raya. Beberapa keputusan strategis dihasilkan dan diharapkan bisa memberi dampak positif bagi keberlangsungan BPP di bawah naungan Kemendagri khususnya bagi BPP Palangka Raya.

Delapan bulan menjabat sebagai Kepala BPP Palangka Raya H. M. Barit Rayanto belum bisa berbicara banyak. Transisi kepemimpinan belum sepenuhnya sukses membawa BPP Palangka Raya menjadi lembaga *think tank* pemerintah kota. Namun beberapa upaya menjadikan BPP bernilai tak patah arang dan terus dilakukan. Dukungan besar Pemkot Palangka Raya terhadap keberadaan BPP menjadi salah satu modal besar bagi Barit untuk menunjukkan, BPP Palangka Raya berperan penting dalam pembangunan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi BPP Palangka Raya saat ini adalah ketiadaan fungsional peneliti. Padahal peneliti merupakan ujung tombak keberadaan BPP di mana pun, dan faktanya kondisi tersebut juga dialami sebagian besar BPP di daerah. Terkait dengan hal itu, beberapa upaya telah dilakukan, salah satunya dengan terus melakukan komunikasi dan koordina-

si dengan pemkot, *stakeholder*, bahkan bersama Kementerian/Lembaga yang ada di pusat seperti BPP Kemendagri, Kemenristek dan Dikti, serta LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Sebagai lokomotif BPP Palangka Raya, Barit sadar akan ke mana tujuan lembaga yang yang dibawanya. Menyediakan tenaga fungsional peneliti menjadi hal wajib yang harus dilakukan dalam waktu dekat. "Saat ini yang kami lakukan adalah mengejar target agar ada tenaga peneliti. Kelemahan kita karena minimnya peneliti. Saat ini baru ada satu orang peneliti dan itu belum resmi, baru calon. Saya melakukan pendekatan dengan kawan-kawan pusat, Kemenristek dan Dikti, serta LIPI. Kita upayakan ada peneliti muda. Buat apa ada BPP kalau tidak ada peneliti, dan itu sangat penting," katanya.

Selain mengupayakan keberadaan peneliti, upaya lain juga dilakukan seperti terus menjalin koordinasi kelitbangan sesuai dengan kewenangan yang ada di BPP Kota Palangka Raya walaupun di Provinsi Kalteng hanya ada Bidang Litbang yang melekat di SKPD Bappeda Provinsi Kalteng. Pada tahun lalu, BPP Palangka Raya juga melakukan program penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Palangka Raya serta Rakor Dewan Riset Daerah (DRD).

Dalam rangka penguatan SIDa BPP Palangka Raya telah melakukan kajian zonasi potensi unggulan pendukung SIDa, BPP Palangka Raya kemudian membentuk Tim Koordinasi SIDa melalui Surat Keputusan Walikota. Selain itu, upaya penguatan SIDa juga dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi ke BPP Ke-

mendagri dan Kemenristek dan Dikti, serta Kabupaten/Kota yang dinilai sudah memiliki dokumen SIDA dan sudah di terapkan.

Ketiadaan peneliti membuat kerja sama kelitbangan dengan pihak ketiga kian digalakan. Beberapa kerja sama dibangun dengan DRD, perguruan tinggi, dan LIPI. Kerja sama DRD dibentuk berdasarkan keputusan Wali Kota, nota kerja sama penelitian juga dibentuk dengan perguruan tinggi. Terakhir BPP Palangka Raya membuat nota kesepahaman (MoU) dengan LIPI terkait pengembangan Danau Hanjalutung. Danau tersebut berada di Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Menurut Barit kajian dilakukan oleh Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Penelitian yang dilakukan



Barit juga mengharapkan BPP Kemendagri turut memperhatikan sumber daya manusia yang ada di BPP Daerah, membangun kapasitas BPP Daerah merupakan tanggung jawab bersama



terkait dengan biota kehidupan danau, PH air danau, dan sebagainya.

"Penelitian tidak lain untuk keberlangsungan jenis - jenis ikan dan biota yang ada di danau tersebut. Intinya agar kelestarian danau tetap alami, dan untuk kebaikan masyarakat setempat," tegasnya.

Danau Hanjalutung menjadi pilihan Pemkot Palangka Raya untuk dijadikan laboratorium alam, danau, sungai, dan hutan menjadi hal yang bisa diunggulkan untuk sektor pariwisata serta sumber penghidupan bagi masyarakat, mengingat Palangka Raya tidak memiliki perairan laut. Dengan adanya laboratorium alam, di masa mendatang sumber daya alam yang ada bisa terus dilestarikan dengan pola-pola bersahabat dan tersistem dengan baik. Nantinya Danau Hanjalutung akan mengedepankan pengelolaan danau yang sustainable dan berwawasan ekologi.

Danau Hanjalutung memang hampir tidak pernah terekspose. Padahal danau yang memiliki luas kurang lebih 12 hektare dengan kedalaman sekira 7 meter tersebut, memiliki pesona yang bagus untuk dijadikan tempat wisata. Apalagi danau yang masih terhubung dengan Sungai Rungan tersebut, dihuni berbagai jenis ikan air tawar seperti jelawat, baung, tahuman, saluang dan berbagai jenis ikan air tawar lainnya. Potensi tersebut sangat bagus untuk wisata pemancingan dan tempat budidaya ikan, ditambah lagi pemandangan sekitar danau sangat menarik.

BPP Palangka Raya berharap hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu rekomendasi kebijakan bagi pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti. Misalnya dari hasil penelitian terjadi pencemaran maka pemerintah setempat harus memperbaiki



lingkungan yang sudah rusak tersebut.

Selain penelitian Danau Hanjalutung, penelitian strategis untuk mendukung pembangunan sangatlah penting. Untuk itu, peran BPP Daerah perlu dimaksimalkan dan diperkuat dengan dukungan beberapa pihak tidak terkecuali dukungan pusat dalam hal ini BPP Kemendagri. Terkait hal itu, BPP Palangka Raya berharap koordinasi dan kerja sama yang dilakukan BPP Kemendagri terus dibangun dan ditingkatkan.

Barit juga mengharapkan BPP Kemendagri turut memperhatikan sumber daya manusia yang ada di BPP Daerah, membangun kapasitas BPP Daerah merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap ada semacam pembinaan dalam berbagai bentuk seperti Diklat dan Bimtek yang diadakan BPP Kemendagri dalam rangka meningkatkan pegiat kelitbangan di daerah.

Minimnya sosialisasi hasil regulasi terkait kelitbangan dari BPP Kemendagri juga menuai kritik tajam. Pasalnya BPP Kemendagri belum terbuka terkait beberapa hasil regulasi. "Untuk itu, sosialisasi sangat penting dengan cara terjun langsung ke daerah atau dengan cara mengundang BPP Daerah," ucap Barit.



Terakhir Barit menyarankan pentingnya membangun jaringan penelitian antara BPP Kemendagri dan BPP Daerah dalam rangka kualitas hasil penelitian dan pengembangan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tidak lupa, Barit juga mengapresiasi penyelenggaraan Rakornas Kelitbangan 2017. Rakornas menurut Barit menjadi salah satu program penting yang diharapkan dapat berdampak banyak bagi keberadaan BPP Daerah. Pemilihan Palangka Raya menjadi tuan rumah juga merupakan salah satu kepercayaan bagi BPP Palangka Raya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

"Saya banyak belajar dari banyak pihak, termasuk dari beberapa kawan di berbagai daerah terutama bagaimana mengelola lembaga kelitbangan, saya baru delapan bulan menjabat. Diharapkan hasil tukar pendapat dari Rakornas ada manfaatnya dan bisa ditindak lanjuti," tutup Barit. (MSR)



Rakornas Kelitbangan 2017, Palangka Raya dalam jepretan kamera





## (Pengelolaan Terminal Leuwi Panjang) Inovasi Terjegal E-money

Sebagai salah satu terminal tipe A yang berada di Kota Bandung, Terminal Leuwi Panjang menjadi titik sentral keberangkatan setiap bus antarkota dan provinsi yang melanjutkan perjalanan ke wilayah barat Indonesia, seperti ke Jakarta dan Banten.

Saat ini, Leuwi Panjang kian bersolek. Jika dilihat dari sisi penataan fisik, kebersihan, dan keamanan, Terminal Leuwi Panjang mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Lingkungan di area terminal semakin tertata, bersih, dan lebih hijau. Hal itu juga dituturkan oleh beberapa sopir bus dan calon penumpang sebagai pengguna terminal yang merasa puas dengan pelayanan Terminal Leuwi Panjang saat ini.

Menurut salah satu sopir bus Prima Jasa, Kiki (30) yang bekerja selama empat tahun tujuan Bandung-Jakarta, sejak setahun terakhir Terminal Leuwi Panjang sudah lebih baik. Kenyamanan dan keamanan pengguna terminal juga kian diperhatikan. Pungutan liar dan sampah yang berserakan juga hampir tidak ditemukan. "Sekarang sudah ada penghijauan dan bersih. Dibanding dulu mungkin lebih suram seperti masih adanya pungutan-pungutan dan pengamen masih banyak. Seka-

Salah satu konsep yang akan digagas oleh Dishub Kota Bandung dalam pengelolaan terminal yang ada di Bandung adalah penggunaan *e-payment* yang meliputi *e-retribusi* dan *e-ticketing*. Penerapan teknologi dinilai tepat, seiring dengan agenda pemerintah yang akan mengubah terminal menjadi *Transit Oriented Development* (TOD)

rang untuk komunikasi kepada petugas pun lebih enak. Pemberangkatan pun sudah beres dan tertib," tuturnya.

Dalam mengelola terminal, Dishub Kota Bandung memunyai program besar dalam mewujudkan sebuah sistem pelayanan yang efektif dan tidak lagi dilakukan dengan sistem manual yaitu dengan pemanfaatan sistem teknologi. Paradigma pengelolaan terminal di kota-kota besar di Indonesia memang harus bergeser dari cara lama menuju ke strategi inovatif melalui penerapan konsep-konsep yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi.

Salah satu konsep yang akan digagas oleh Dishub Kota Bandung dalam pengelolaan terminal yang ada di Bandung, tidak terkecuali Terminal Leuwi Panjang adalah penggunaan teknologi *e-payment*. Di dalamnya meliputi *e-retribusi* dan *e-ticketing*. Menurut Anton Sunarwibowo Sekdis Perhubungan Kota Bandung, penerapan beberapa teknologi tersebut dinilai tepat, seiring dengan agenda pemerintah yang akan mengubah terminal menjadi *Transit Oriented Development* (TOD). Sebuah konsep integrasi transportasi kota, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kota akibat arus distribusi barang dan orang yang lancar dan peningkatan pendapatan dari pajak pembangunan.

*E-payment* diwacanakan segera diterapkan di Terminal Leuwi Panjang. salah satu program *e-payment* adalah *e-retribusi* yaitu sistem pembayaran retribusi tidak tunai (*noncash*). Selain *e-retribusi*, *e-ticketing* menjadi salah satu solusi yang digagas Dishub Kota Bandung dalam sistem pelayanan Terminal Leuwi Panjang. sama halnya dengan *e-retribusi*, *e-ticketing* baru digagas pada 2017. *E-ticketing* dan *e-retribusi* dihar-

apkan dapat meningkatkan pelayanan dan PAD terminal terkait sistem pembelian tiket *online* serta retribusi elektronik.

*E-payment* digadang-gadang bakal meminimalisasi tingkat kebocoran retribusi, menghilangkan praktik percaloan, dan menghilangkan petugas ilegal yang ada di lapangan. Selain itu, pelaporan hasil retribusi dan tingkat pelayanan juga bisa dilakukan dengan cepat dan akurat, mengingat tidak ada uang *cash* yang diterima, na-

mun semua dilakukan dengan sistem elektronik. "Saat ini *kan* kita masih kerepotan kalau menghitung uang recehan setiap hari. Maka *e-payment* itu jadi solusinya. *E-retribusi* akan menghilangkan kebocoran dan praktik percaloan," kata Anton Sunarwibowo Sekdishub Kota Bandung ketika ditemui di kantornya di Jl. Leuwi Panjang, Bandung.

*E-payment* sangat mendesak untuk dilakukan. Pasalnya banyak masalah kebocoran yang terjadi di tataran pengelolaan keuangan terminal akibat tidak adanya transparansi secara ril. Iwan Nugraha sebagai Kasubbag UPT Terminal menceritakan kesulitannya dalam mengelola retribusi terminal.

Sebagai contoh, Terminal Leuwi Panjang menetapkan retribusi Rp 7.500 untuk bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan Rp 5.000 untuk AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi). Menurut Iwan, tidak jarang beberapa bus ada yang memberi lebih meski pun nilainya tidak besar. Namun jika dihitung jumlah bus yang masuk terminal lebih dari 500 bus, itu pun belum termasuk bus sedang, elf, dan angkot, maka bisa diperkirakan pendapatan terminal per hari bisa lebih dari yang dilaporkan. "Tidak ada jalan lain,

*e-payment* mendesak untuk segera dilaksanakan," tegas Iwan.

Penerapan *e-retribusi* pada tahun ini rupanya tidak akan semulus yang direncanakan. Menurut Iwan penerapan *e-retribusi* menemui kendala dan jalan buntu, serta akan sangat sulit terealisasi. Sebab, Bank Jabar selaku *partner* utama pemerintah Kota Bandung belum siap jika pengelolaan *e-retribusi* harus menggunakan *e-money*. Bank Jabar juga tidak mengeluarkan produk *e-money*. Sementara *e-money* merupakan salah satu produk Bank Mandiri. Hal tersebut hanya akan terealisasi jika ada kesepakatan di antara keduanya. Selain itu, penggunaan *e-money* prosesnya bisa memakan waktu lebih lama dibanding yaitu H+1. Itu juga yang menjadi kesepakatan dengan Bank Jabar kian sulit karena Bank Jabar menginginkan seluruh proses terjadi pada hari yang sama.

"Selama ini *kan*, setiap uang penarikan dari bus AKDP dan AKAP oleh petugas lapangan dikirim ke bendahara penerimaan UPT Terminal. Kemudian sorenya kita setorkan ke Bank Jabar, harus masuk hari ini, karena mereka maunya hari ini juga. Selanjutnya, oleh



Bank Jabar ditransfer ke rekening Dishub Kota Bandung. Sementara, jika dikelola menggunakan *e-money* prosesnya pasti lebih dari satu hari," kata Iwan.

Namun sejauh ini sudah ada yang memfasilitasi agar terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu BI, untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, sehingga *e-retribusi* bisa secepatnya dijalankan. "Dishub juga tidak tinggal diam, kita tengah memperjuangkan solusi secepatnya, agar secepatnya bisa diputuskan," terangnya.

Selanjutnya menurut Iwan, perjuangan Dishub Kota Bandung menemui titik terang setelah pihak Telkom siap memfasilitasi operator pelaksanaan *e-retribusi* melalui Bank Jabar, tanpa menggunakan *e-money* dan proses dapat dilaksanakan pada hari itu juga.

Jika terealisasi, penerapan *e-retribusi* di Terminal Leuwi Panjang, tegas

Iwan, baru siap dilaksanakan untuk bus AKDP dan AKAP. Nantinya setiap bus yang masuk terminal akan dikenakan tarif layaknya *e-toll*. Masing-masing bus ketika masuk harus menempelkan kartu elektronik pada sebuah mesin. Mesin juga nantinya mencatat waktu kedatangan dan bisa memperkirakan pada jam berapa mobil tersebut harus kembali berangkat dari terminal. Catatan tersebut juga dibarengi dengan sistem manual oleh petugas lapangan, yang bertugas mem-backup data serta pengecekan kendaraan secara resmi.

Selain *e-retribusi*, Terminal Leuwi Panjang akan melaksanakan penggunaan *e-ticket* pada 2017. "Ini paling memungkinkan untuk dilaksanakan tahun ini. Pasalnya tidak berhubungan dengan PAD, penjualan tiket tidak ada hubungannya dengan PAD, kaitannya hanya dengan PO bus," tutur Iwan.

*E-ticketing* paling memungkinkan dilaksanakan secepatnya, dikarenakan prosesnya sangat sederhana. Sama halnya dengan *e-retribusi*, *e-ticketing* baru bisa dialokasikan pada bus AKDP dan AKAP. *E-ticketing* di Terminal Leuwi Panjang rencananya akan mengadopsi sistem yang diterapkan PT KAI (Kereta Api Indonesia). Dengan *e-ticket*, nantinya hanya calon penumpang saja yang boleh masuk ke dalam terminal. Kemudian setiap pendapatan dari tiket, oleh pihak Dishub akan ditransfer langsung kepada PO bus sesuai dengan jumlah pengguna bus yang bersangkutan.



Tetapi, *e-ticket* juga mengalami kendala, salah satunya para PO bus tidak serta merta menerima. Ketika penjualan tiket dilakukan melalui teknologi maka pendapatan orang-orang yang bekerja untuk PO bus di lapangan akan hilang.

Untuk menunjang penerapan beberapa teknologi *e-ticket* dan *e-retribusi* Iya Sunarya menuturkan, pihaknya akan memperbaiki beberapa fasilitas yang belum lengkap di Terminal Leuwi Panjang seperti zona penumpang bertiket dan tidak bertiket, zona perpindahan (perpindahan penumpang dari kota ke kota), zona eksekutif, dan zona peristirahatan pengemudi. "Keempat zona tersebut menjadi kewajiban pihak terminal untuk segera direalisasikan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan," tutur Iya.

#### Retribusi tidak mencapai target

Wacana inovasi pelayanan dan teknologi seperti yang diungkapkan pengelola terminal di atas, bisa jadi merupakan sebuah solusi terhadap peningkatan PAD. Karena jika perbaikan hanya dilakukan dari tampilan fisik saja ternyata tidak lantas membuat PAD meningkat.

Perbaikan infrastruktur dan pelayanan terminal Leuwi Panjang, nyatanya tidak secara otomatis meningkatkan PAD. Perbaikan fisik terminal yang jauh lebih baik justru berbanding terbalik dengan PAD yang didapatkan. Pengakuan Kepala Sub Wilayah Terminal Leuwi Panjang khusus menangani PAD Terminal Arsim mengatakan, perbaikan fisik terminal tidak berpengaruh terhadap pendapatan terminal bahkan PAD Terminal Leuwi Panjang terjun bebas dari tahun ke tahun.

Hal itu juga dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya semenjak adanya kebijakan baru terkait penarikan retribusi, yaitu petugas tidak lagi diperbolehkan memungut di luar terminal. Menurunnya PAD menurut Arsim ternyata tidak hanya terjadi di Leuwi Panjang, namun juga terjadi di 16 terminal lainnya di Kota Bandung. "Sekarang, PAD kita hancur. Dulu,

target Rp 7,1 juta per hari di seluruh terminal di Kota Bandung selalu tercapai. Sekarang payah! Untuk Leuwi Panjang sendiri, dari target Rp 600 ribu per hari hanya tercapai Rp 200 ribu per hari. Artinya, Terminal Leuwi Panjang kehilangan Rp 400 ribu per hari," akunya.

Apa yang dikatakan Arsim bukan ucapan belaka, data target dan realisasi PAD Dinas Perhubungan Kota Bandung menunjukkan terjadi *trend* penurunan PAD dari tahun ke tahun. Dalam tujuh tahun terakhir pendapatan tertinggi hanya didapat pada 2010 yaitu terealisasi target sebesar 94,04 persen, sementara target paling rendah yaitu pada 2016 yaitu sebesar 16 persen. Dari persentase tersebut, retribusi terminal masih sangat rendah dibanding retribusi parkir dan retribusi pajak kendaraan bermotor. Target retribusi parkir pada 2016 sebesar Rp 9.966.034.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp 6.706.836.900.

#### Polemik pindah kelola

Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan No 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan tidak hanya akan membuat PAD dari terminal Leuwi Panjang terjun bebas, tetapi akan terperosok dalam. Pasalnya dalam peraturan tersebut terminal di daerah yang bertipe A harus berpinda-

h pengelolaan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, secara otomatis, pendapatan dari Terminal Leuwi Panjang akan masuk ke pemerintah pusat. Pengambilalihan terminal tipe A oleh pemerintah pusat dimaksudkan agar pengelolaan terminal bisa lebih optimal, pemerintah pusat dianggap memiliki dana yang cukup dibandingkan daerah.

Masalah yang kemudian muncul di Terminal Leuwi Panjang adalah pemerintah daerah Kota Bandung yang tetap *ngotot* untuk mempertahankan terminal tipe A tersebut. Pemkot Bandung merasa mampu mengelola Terminal Leuwi Panjang. Selanjutnya, jika dipindahkan, beberapa inovasi yang sudah dirancang belum tentu bisa dilanjutkan. Pihak Dishub Kota Bandung dalam hal ini cukup terbuka, siapa pun yang akan mengelola kelak, diharapkan pengelolaan terminal bisa lebih optimal.

Kesiapan pengelolaan Terminal Leuwi Panjang oleh Pemkot Bandung sebaiknya tidak hanya manis dikata. Namun akan lebih bermakna jika diikuti dengan bukti pembangunan yang nyata. Hal itu bisa dimulai dengan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna terminal dengan berbagai inovasi yang diterapkan. (MSR)



## WATER IS PRECIOUS

Sebanyak 1,7 hingga 3 miliar penduduk di dunia mengalami kekeringan. Penduduk China & India diperkirakan menempati setengah dari jumlah perkiraan tersebut.



## SYAIKH USMAN

Peneliti *Social Monitoring and Early Response Unit* (SMERU)

# Tetap Meneliti di Usia Senja

**M**emasuki usia 72 tahun, tidak menghalangi Syaikh Usman untuk tetap bergiat dalam dunia penelitian. Bahkan menurutnya, jika akal dan pikiran dibiarkan istirahat begitu saja setelah sekian lama digunakan untuk meneliti justru akan mengalami kemunduran berfikir dan mempercepat penuaan.

Uban putih terlihat memancar dari rambut rapih bergaya belah pinggir seorang pria. Sebuah kacamata terlihat menyantol pada hidung dan garis mata yang mulai berkerut. Seluruh rambutnya boleh beruban semua, tapi langkah kakinya dengan sigap menaiki anak tangga di Gedung Smeru Research Institute dengan cepat ke lantai 2.

Bukan selangkah demi langkah anak tangga yang dia naiki, namun langsung dua anak tangga sekaligus. Tidak tampak *ngos-ngosan* ataupun mengganggu persendian yang umumnya dirasakan kakek seusianya. “Silahkan duduk,” katanya dengan sopan.

Kami memulai perbincangan tentang dunia penelitian, dunia yang melirikinya hingga bisa seperti sekarang. “Di Smeru Research Institute ini ketertarikan saya akan dunia penelitian semakin mantap,” terang pria asal Palembang, Sumatera Selatan itu.

Mengawali pendidikan sebagai calon guru di IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan) Yogyakarta (kini menjadi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)) membuat pria kelahiran Tanjung Batu, Sumatera Selatan 1945 itu menyimpang dari keluarga besarnya yang berlatar belakang pesantren semua. “Di masa itu memang sudah mulai muncul kesadaran bahwa kepesantrenan tidak otomatis menentukan kesantrian seseorang,” terang bapak enam orang anak itu.

Lulus dari S1 di IKIP Yogyakarta, Syaikh kemudian pulang ke Palembang untuk menjadi dosen di UNSRI (Universitas Sriwijaya). Di dunia pendidikan, dia menyadari bahwa kewajiban seorang dosen tidak hanya

mengajar, tetapi juga belajar. Terutama belajar mengaplikasikan ilmunya di dunia penelitian.

Kemudian, baru baru setahun pada 1976, Syaikh mencoba mengikuti test seleksi di Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Banda Aceh. “Pada saat itu hanya ada di 3 Provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sulaesi Selatan, dan Jakarta dan pesertanya sangat terbatas. Tapi sekarang program itu sudah tidak ada lagi,” terangnya.

Syaikh boleh berbangga, dari ribuan dosen yang mendaftar dia masuk dalam pelatihan penelitian selama setahun yang diadakan oleh pemerintah itu. Akibatnya, dia jadi keasyikan meneliti dan mulai mungurungi intensitasnya dalam mengajar. Namun, kerja keras dan pengorbanannya bolak-balik Palembang – Aceh rupanya berbuah manis. Pada pelatihan ini dia berhasil menjadi peserta terbaik di Aceh. Sejak itulah dia banyak mendapat kesempatan untuk menggeluti dunia penelitian.

Tulisan Syaikh umumnya membahas masalah praktis yang berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Ulasannya seringkali dikaitkan dengan kebijakan publik dan sosial. Sebenarnya dalam bidang kepenulisan, dia sudah terbiasa sejak dulu. Kebiasaannya menulis sudah mulai sejak di sekolah rakyat melalui surat menyurat dengan kakaknya yang tengah belajar di Kairo, Mesir. Lalu di awal dekade 1970, artikelnya banyak mengisi koran lokal terbitan Yogyakarta. Maka tidak heran dalam pelatihan itu dia menjadi peserta terbaik.

Mengikuti pelatihan selama setahun, rupanya membuat Syaikh terlena dan meninggalkan dunia pendidikan untuk mengabdikan diri sepenuh hati pada dunia penelitian. Dia lantas mendapatkan tawaran untuk bekerja di CPIS (Center for Policy and Implementation Studies) pada 1985 – 1997 di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan HIID (*Harvard Institute for International Development*). Di sanalah, sayapnya mulai mengepak dengan mendapatkan kesempatan melanjutkan S2 dan S3 di Cornell University Amerika Serikat.

### Salah satu pendiri SMERU

Krisis ekonomi 1997/1998 menggiring Syaikh dkk menjadi pekerja kontrak Bank Dunia Mereka ditugaskan untuk menyediakan informasi tentang dampak krisis secara cepat.

“Salah satu keterlibatan kami yang

penting adalah dalam proses Survei Dampak Krisis pada Tingkat Kecamatan di Seluruh Indonesia 1998. Di tengah kegelapan informasi tentang apa yang terjadi dalam keseharian hidup rakyat saat itu, kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai dan bermakna khusus bagi kami. Kemudian, beberapa bulan setelah survei tersebut, ketika Pemerintah dan Bank Dunia memutuskan untuk melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kami bertugas mengevaluasi pilot PPK,” ceritanya.

Ketika pemulihan krisis diduga akan berlangsung lama, Pemerintah dan Bank Dunia serta beberapa organisasi penyanggah dana, bersepakat untuk memobilisasi beberapa peneliti guna terus melakukan pemantauan dampak krisis. “Kami kemudian membentuk empat kelompok penelitian yang berada di bawah administrasi Bank

Karena menjadi seorang peneliti itu bukan seberapa banyak kamu menghasilkan karya penelitian mu tapi seberapa banyak orang lain tahu dan pergunakan apa yang kau teliti

Dunia dengan nama *Social Monitoring and Early Response Unit* (SMERU). Tiga dari empat kelompok tersebut berkonsentrasi pada kegiatan penelitian, sementara yang satunya lebih bergerak di arena *social development*,” tandasnya.

Sebagai sebuah unit yang berada di bawah Bank Dunia dari awal Syaikh sudah mengetahui bahwa SMERU akan berakhir pada 31 Desember 2000 (sesuai kontrak dengan Bank Dunia). Pemikiran tentang masa depan SMERU pada 2001 mulai hangat didiskusikan sejak akhir 1999, baik di lingkungan staf SMERU, maupun para pejabat Pemerintah dan Lembaga Internasional. Pada 8 Desember 1999, Syaikh dan teman berinisiatif mengirim e-mail ke beberapa anggota tentang Pembentukan SMERU secara mandiri. “Banyak perdebatan atas pendirian SMERU, lalu kami langsung saja menunjuk Sudarno Sumarto untuk menjadi direktur eksekutif. Semua pun sepakat, hingga

akhirnya pada 2001 SMERU mulai serius membahas visi misi, bentuk lembaga, manajemen, dan pendanaan setelah lepas dari Bank Dunia,” paparnya.

Sejak itu persiapan pembentukan makin berkembang dan akhirnya SMERU tercatat mulai berdiri pada 1 Januari 2001 yang lepas dari administrasi Bank Dunia. “Sejak awal SMERU sudah dipusingkan persoalan pendanaan karena AusAID sebagai penyanggah dana di masa itu hanya memberi ‘nyawa’ untuk kehidupan SMERU selama tiga bulan. Namun, Direktur SMERU ‘nekad’ untuk membuat kontrak dengan staf dalam jangka waktu enam bulan. Dari tahun ke tahun dana merupakan persoalan pelik yang terus menerus didiskusikan di lingkungan SMERU. Tapi seiring berjalannya waktu dan dengan dukungan berbagai pihak, SMERU berhasil menjadi lembaga yang dikenal luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang kondisi keuangan SMERU lumayan menggembirakan,” paparnya.

### Tetap meneliti

Meski sudah tidak sesering dahulu saat muda, tapi Syaikh masih aktif melakukan penelitian, terutama di bidang sosial. “Saya masih membina dan meneliti, meski sebenarnya saya sudah dipensiunkan pada usia 70 tahun, tapi teman-teman bilang saya masih diizinkan untuk menjadi peneliti, jadi saya dikontrak sebagai peneliti pendukung,” ungkapnya.

Diakui Syaikh, ada banyak hasil penelitian yang sudah ia kerjakan, namun ada beberapa di antaranya yang membuatnya begitu terkesan dan bangga atas profesinya menjadi peneliti. Yakni saat dia meneliti tentang Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus yang ditulis bersama 4 peneliti lainnya. “Karena SMERU banyak sekali bidang penelitiannya, dan kami selalu mengunggah hasil penelitian di web, sehingga bisa dilihat berapa orang yang membaca atau mengunduh hasil penelitian kami. Sampai sekarang penelitian tentang DAK itu masih banyak orang yang membaca atau mengunduhnya, tidak tahu mengapa, mungkin karena masih jarang orang yang betul-betul meneliti tentang itu atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi yang jelas, ini menjadi sangat bermakna dan berkesan bagi saya. Karena menjadi seorang peneliti itu bukan hanya seberapa banyak kamu menghasilkan karya penelitian tapi seberapa banyak orang lain tahu dan pergunakan apa yang kamu teliti,” tandasnya. (IFR)

# Negara Paling Bahagia 2017

## Eropa Paling Dominan

Ukuran kebahagiaan di negara kaya bukan lagi soal pendapatan. Sustainable Development Solution Network (SDSN) merilis laporan riset World Happiness Report 2017 yang menempatkan Norwegia di posisi teratas daftar negara paling bahagia tahun ini.



### SKOR INDEKS



DARI sepuluh negara paling bahagia pada 2016-2017, tujuh di antaranya berada di Benua Eropa. Pendapatan perkapita yang tinggi serta kualitas hidup yang baik menjadi alasan mengapa rakyat di Benua Biru itu mendapat predikat paling bahagia.



- STABILITAS EKONOMI**  
 Stabilitas perekonomian negara, kendati harga minyak mentah yang menjadi andalan negaranya terus melorot. Berhasil melepaskan diri dari ketergantungan pada penjualan minyak dengan memproduksi secara perlahan serta menginvestasikan dana penjualan untuk masa depan. Berhasil mengisolasi diri dari tekanan harga minyak yang melanda produsen lain, sembari meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui layanan sosial, donasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

# PENGADAAN 7 JUTA BLANKO E-KTP TELAH DISETUJUI MENDAGRI

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah menandatangani pengadaan blanko KTP elektronik (*e-KTP*) sebanyak 7 juta lembar. Pendistribusian *e-KTP* akan dilakukan pada akhir Maret hingga April 2017 dan akan dilakukan secara bertahap ke beberapa daerah. Selain itu Tjahjo menunjuk perusahaan dalam negeri untuk tender proyek pengadaan blanko *e-KTP* dan pemeliharaan server yang sebelumnya dipegang perusahaan Amerika Serikat.

“Yang menang perusahaan dalam negeri. Sampai sekarang sudah 96,54 persen dari catatan 4,5 juta yang sudah mendaftar. Tender untuk pemeliharaan server yang pada masa lalu dipegang oleh perusahaan AS, akan kami cari perusahaan dalam negeri” jelasnya.

Tjahjo optimis pendistribusian *e-KTP* akan selesai April sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk selanjutnya, pihaknya akan menyediakan sebanyak 3 juta lembar blanko *e-KTP* untuk masyarakat yang baru mendaftar.



“Mulai bertahap yang 4,5 juta yang tertunda menerima blankonya (pada April ini-red), mudah-mudahan sudah kita distribusikan. Selain itu, kami juga menyediakan per tahun 3 juta KTP yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memperbarui seperti dari bujangan ke menikah, dari remaja ke dewasa, yang rusak, yang pindah alamat, dan sebagainya,” jelasnya.

Blanko *e-KTP* juga akan diprioritaskan untuk wilayah DKI Jakarta. Pemasalnya saat ini Jakarta akan menghadapi pilkada putaran kedua. Masalah *e-KTP* menjadi penting karena masih banyak masyarakat tidak memiliki *e-KTP*, sehingga tidak bisa mendapat hak pilih.

“Saya kira secepatnya, karena lebih kurang 200 ribu yang belum punya *e-KTP* di Jakarta, dan selanjutnya akan bertahap di semua daerah,” imbuh Tjahjo. (Diolah dari berbagai sumber)



# MENDAGRI: PROGRAM JAKARTA DAN DAERAH HARUS BERSINERGI

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginginkan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di semua daerah di Indonesia bisa selaras dengan program dari pemerintah pusat. Khusus di Jakarta, Mendagri meminta musrenbang melibatkan daerah-daerah penyangga di sekitarnya.

“Tujuannya (musrenbang) menyerasikan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus nyambung. Kemudian program daerah harus fokus dan bersinergi,” kata Mendagri di sela acara Sidang Pleno Musrenbang Provinsi DKI Jakarta 2017

“Misalnya kalau DKI, kalau mau sukses juga harus bersinergi dengan Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan Depok untuk mengatasi banjir, mengatasi kemacetan dan sebagainya,” imbaunya.

Mendagri juga menyebutkan hasil musrenbang yang dilakukan pemerintah tiap provinsi di Indonesia akan dibahas di tingkat nasional. Tujuannya supaya rencana pembangunan di tingkat daerah bisa sejalan dengan program yang telah disusun oleh pemerintah pusat. “Dan memastikan, setiap penganggaran melalui perencanaan program ketat, ada anggarannya, memastikan pelaksanaannya,” ujar dia.

Tjahjo juga berpesan pemerintah daerah harus fokus melakukan pembangunan, salah satu yang harus diselesaikan khususnya adalah bidang ekonomi dan ketimpangan sosial. Tjahjo dalam musrenbang Sulsel beberapa waktu lalu juga menyampaikan dalam membangun daerah dan masyarakat tidak boleh menghilangkan budaya dan jati diri daerahnya sehingga mampu maju mandiri.

“Keberhasilan juga harus dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pertemuan rutin sebagai evaluasi terhadap pemerintah daerah,” ucap Tjahjo. (Diolah dari berbagai sumber)

# MK Batalkan Kewenangan Mendagri Cabut Perda, Ini Respons Jokowi

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait pembatalan wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencabut Peraturan Daerah. Pembatalan itu berlaku setelah MK mengabulkan uji materi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan sejumlah pihak.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menghormati keputusan itu. Meski demikian, Jokowi mengingatkan, penyederhanaan regulasi tersebut untuk memperbaiki iklim investasi di Tanah Air.

“Kita juga sangat menghargai apa yang diputuskan MK, tapi kita juga memerlukan sebuah penyederhanaan perizinan, percepatan perizinan dalam rangka investasi sehingga akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara kita,” ujar Jokowi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah pusat telah membatalkan ribuan Perda yang dinilai menghambat iklim investasi. Langkah itu tentunya diambil bukan tanpa sebab. Presiden mengharapkan, melalui kebijakan deregulasi itu, investasi dapat dengan mudah dijalankan di mana pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama.

“Kita ini ingin menyederhanakan, ingin menghapus, ingin menghilangkan hambatan-hambatan dalam perizinan dan investasi baik pusat maupun daerah, karena kita harus sadar bahwa kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tanggung jawab saya dari pusat sampai daerah itu semua harus diselesaikan,” Presiden menegaskan.



Masih bisa disiasati

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan wewenang Mendagri untuk menganulir Peraturan Daerah (Perda). Namun, Tjahjo mengatakan pihaknya masih bisa menyiasatinya dengan menggunakan Pasal 243 Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.

“Pasal tersebut di atas dapat digunakan untuk mengendalikan perda yang menghambat investasi atau perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Tjahjo dalam pesan tertulisnya.

Tjahjo mengatakan dalam Pasal 251 sebagai *post control* memang sudah dibatalkan oleh MK, namun masih ada ketentuan yang *pra-control*-nya. Menurut Tjahjo, Kemendagri dapat memanfaatkan batas waktu 7 hari sesuai putusan MK tersebut. Dengan mekanisme ini, Kemendagri dapat mengontrol penerbitan perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Tjahjo mengatakan Kemendagri membuat Peraturan Mendagri (Permendagri) untuk perhitungan batas waktu tujuh hari tidak dihitung sejak terima berkas. Namun, tujuh hari dihitung sejak rancangan perda dinyatakan lengkap formil dan materil oleh Kemendagri melalui berita acara serah terima berkas dinyatakan lengkap.

“Dengan demikian sejatinya Kemendagri sudah sejak dini mengetahui kelemahan-kelemahan dalam perda yang akan dibatalkan,” kata Tjahjo Kumolo. (Diolah dari berbagai sumber)

# Tak Lama Lagi, Mamut Akan “Bangkit” dari Kepunahan

**T**im ilmuwan dari Harvard University berencana untuk membangkitkan kembali mamut dengan cara membuat embrio yang merupakan campuran mamut dan gajah asia.

Dua tahun dari sekarang, mungkin kita akan bisa melihat kembali rupa mamut, gajah purba dari era Pleistosen yang punah sejak sekira 10.000 tahun lalu. Tim ilmuwan dari Harvard University berencana untuk membangkitkan kembali mamut dengan cara membuat embrio yang merupakan campuran atau hibrida dari mamut dan kerabatnya yang masih hidup, yaitu gajah asia.

“Tujuan kami yaitu memproduksi embrio hibrida mamut dan gajah asia. Sebenarnya hewan itu akan menjadi lebih mirip gajah dengan beberapa ciri mamut,” ujar George Church, peneliti studi.

Tahun lalu, Church menjelaskan, proses tersebut melibatkan DNA dari sisa-sisa mamut yang terawetkan pada tundra beku. DNA tersebut kemudian disambungkan dengan genom gajah asia. Kedua spesies tersebut berkerabat sangat dekat. Bahkan seandainya mamut masih hidup hingga saat ini, mereka akan mampu berkembang biak dengan perkawinan antarspesies.

Proyek ini menuai berbagai kritik, beberapa ahli konservasi bahkan menyebut sebagai “tipuan”, dan mengatakan bahwa gagasan untuk “membangkitkan dari kepunahan” adalah pengalihan perhatian dari upaya pelestarian spesies yang masih hidup.

Church membantah hal tersebut dan mengatakan upayanya akan

meningkatkan pelestarian gajah asia, merekayasa mereka agar dapat beradaptasi lebih baik dalam cuaca dingin, sehingga memungkinkan hewan itu hidup dengan wilayah jelajah yang lebih luas.

Church mengatakan, dalam bayangannya, hewan hibrida tersebut dapat tinggal di kawasan-kawasan tundra di Rusia dan Kanada. Ia berpendapat, kehadiran mereka bisa membantu mencegah dampak perubahan iklim dengan berbagai cara. Salah satunya, mamut dapat menjaga daerah dingin dengan memakan rumput-rumput mati, sehingga memungkinkan cahaya matahari mencapai rumput musim semi yang akhirnya dapat mencegah erosi. Selain itu, mamut juga dapat menyingkirkan salju tebal, sehingga memungkinkan udara dingin berpenetrasi ke dalam tanah.

Church dan timnya berencana menumbuhkan hewan hibrida tersebut dalam rahim b u a t a n , dan tidak

memanfaatkan gajah betina hidup karena alasan etis. Tetapi beberapa ilmuwan skeptis dengan ide tersebut dan mengatakan bahwa skema rahim buatan memiliki kekurangan serius tersendiri.

“Ide tim Church untuk menumbuhkan embrio di dalam rahim buatan, tampaknya terlalu ambisius, karena hewan yang dihasilkan tak akan mendapatkan semua interaksi pra kelahiran dengan induknya,” ujar Matthew Cobb, salah satu profesor di University of Manchester.

Jika tim Church berhasil, mungkin Mamut dan hewan punah lainnya seperti Dinosaur dapat “bangkit” kembali ya? (IFR/ National Geography)



# Ini Daftar Smartphone Terbaru yang Bakal Meluncur di 2017

Bukan hanya sebagai alat komunikasi, *smartphone* juga sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Kehadiran *smartphone* terbaru juga tentu akan menarik perhatian masyarakat. Apalagi dengan berbagai fitur terbaru dalam *smartphone* yang ditawarkan. Berikut ini sejumlah *smartphone* terbaru yang siap diluncurkan. Seperti dinukil dari laman *Gadgets Now*.

## ● ZTE Gigabit Phone

Terakhir daftar *smartphone* terbaru yang akan diluncurkan yakni ZTE Gigabit Phone, di mana *smartphone* ini bisa merekam dalam 360 derajat dan juga didukung oleh VR video dan support ultra. ZTE juga menyatakan ponselnya sebagai *smartphone* Super-Generation yang telah siap mendukung jaringan 5G dengan kecepatan internet 1Gbps. Sayangnya belum ada yang bisa memprediksi berapa ZTE Gigabit ini akan dijual. (IFR/Diolah dari berbagai sumber)

## ● Moto G5 Plus

Buat Anda yang ingin mengganti *smartphone* Anda namun budget terbatas, mungkin ini adalah solusinya. Motorola G5 Plus ini akan dibandrol dengan harga Rp. 2 jutaan. Meski murah, Moto G5 Plus dilengkapi dengan OS Android v 7.0 nougat dengan CPU Octa Core dan layar 5,2 inci Full HD Resolusi serta RAM 4 GB

## ● Sony Xperia XZ Premium

Desainnya yang elegan dan slim membuat Sony telah sukses meluncurkan *smartphone*-nya yakni Xperia X7. Produk terbaru dengan layar 5,5 inci 4K resolusi dengan kamera belakang 19 MP dan kamera depan 13 MP serta kecepatannya disokong oleh 2xDual-core 2.15 GHz. Namun sayangnya, Sony Xperia XZ Premium ini masih menggunakan OS Android Marshmallow v6.1 dengan RAM 3GB. Tapi kelebihan *smartphone* ini tahan air hingga dan debu hingga kedalaman 10 meter selama 30 menit. Namun sayangnya, belum ada informasi resmi terkait harga dari Sony Xperia XZ Premium ini, banyak orang yang memprediksikan harga Sony keluaran terbaru ini dibandrol dengan kisaran Rp. 10 – 11 jutaan.

## ● Sony Xperia XZs

Selain Sony Xperia XZ Premium, Sony juga akan meluncurkan Xperia XZs yang memiliki 5,2 inci Full HD resolusi. *Smartphone* Sony Xperia XZs ini sendiri resmi diperkenalkan pada Februari 2017 dan dijadwalkan meluncur pada 5 April 2017 menasak kalangan menengah atas. Di dalamnya tertanam processor handal dengan kekuatan RAM 4 GB serta sistem pengoperasian Android Nougat terbaru. Bukan hanya itu saja, ponsel ini juga telah dilengkapi dual kamera dengan resolusi 19 MP 1/2,3” kamera. Harga Sony Xperia XZs dibandrol dengan harga Rp. 9.3 jutaan

## ● Nokia 6

HMD secara global mengumumkan Nokia 6 *smartphone* yang akan segera diluncurkan dengan *body* elegan dan kokoh dari aluminium. Fiturnya yang sudah mengikuti *trend* kekinian ini juga sudah dilengkapi dengan *finger print*. Selain itu, Nokia 6 ini sudah menggunakan android 7.0 Nougat, RAM 4 GB dan Storage 64 GB. Nokia 6 juga dibekali dengan kamera 16 MP (belakang) dan 8 MP (depan) dengan dibekali aperture f/2.0 dual-tone LED flash yang dapat menampilkan gambar terbaik pada layar sentuh sebesar 5.5 inch. Fiturnya yang cukup lengkap ini dibandrol dengan harga Rp 3.1 juta dan akan diluncurkan pertama kali di China.

## ● Huawei P10 Plus

Huawei juga akan kembali meluncurkan produk merk yang terbaru yakni Huawei P10 Plus. Di mana *smartphone* ini didukung oleh 4,5 ITF connectivity. Selain itu, ponsel ini juga memiliki 5,5 inci Quad HD resolusi dengan RAM 6 GB dan memori internal 128 GB. Kinerja Huawei disokong oleh prosesor HiSilicon Kirin 960 Octa Core dan GPU Mali-G71 MP8, maka kinerjanya jelas sangat powerfull. Selain itu, untuk urusan fotografi Huawei P10 Plus ini menggunakan kamera utama Dual 12 MP, f/1.7 dual-LED (dual tone) flash. Kamera ini juga sudah mampu melakukan perekaman video 4K/ultra HD. Buat yang suka foto *selfie* disematkan kamera depan 8MP lensa wide angle. Anda juga tak perlu khawatir kehabisan baterai, karena huawei P10 Plus ini dilengkapi dengan baterai tanam Li-Ion 4100 mAh. Maka tidak heran, jika android v 7.0 nougat ini dibandrol dengan harga Rp. 8 jutaan

## ● LG G6

Salah satu produk teknologi terbesar di Korea Selatan yakni LG, juga berencana mengeluarkan *smartphone* terbarunya. *Smartphone* ini memiliki 1.440 x 2.880 resolusi dan 5,7 inci FullVision. LG G6 ini menggunakan kamera belakang 16 MP dan kamera depan 12 MP dengan laser autofocus, OIS dan dual LED flash. Tak tanggung-tanggung, untuk penyimpanan, LG berani memberikan RAM 6 GB dan memori internal 64/128 GB dengan layar 5.7 inch. Untuk seharga itu, LG membandrolnya dengan nilai Rp. 8 jutaan.

## ● BlackBerry KEYone

Nyatanya, BlackBerry juga akan meluncurkan produk *smartphone* terbaru yakni KEYone. *Smartphone* ini sudah bisa dipesan di Amerika Serikat dan beberapa wilayah lainnya dengan RAM 3 GB, layar 4,5 inci gorilla glass 4, posesor Qualcomm Snapdragon 625 octa-core 2.0 GHz, android nougat dengan sistem *fingerprint* dan daya baterai 3.500 mAh. Harga BlackBerry ini dibandrol senilai Rp. 7.4 jutaan.



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Indonesia

## PERBANDINGAN NILAI DAN PERINGKAT IPM 2015

	<b>SINGAPURA</b> NILAI IPM 0,928   PERINGKAT 7   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA SANGAT TINGGI
	<b>JEPANG</b> NILAI IPM 0,902   PERINGKAT 11   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA SANGAT TINGGI
	<b>KOREA SELATAN</b> NILAI IPM 0,897   PERINGKAT 16   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA SANGAT TINGGI
	<b>BRUNEI</b> NILAI IPM 0,882   PERINGKAT 18   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA SANGAT TINGGI
	<b>MALAYSIA</b> NILAI IPM 0,781   PERINGKAT 52   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA TINGGI

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat meski lambat. Namun, ketimpangan pembangunan antarkelompok jender dan daerah menjadi tantangan. Karena itu, kebijakan anggaran perlu dipertajam untuk mendorong sektor terkait indikator indeks tersebut.

Nilai IPM Indonesia 2015 **0,689** dan masuk kelompok negara dengan pembangunan manusia menengah

IPM Indonesia 2015 di urutan **113** dari 188 negara atau sama dengan posisi 2014 dengan metode penghitungan sama

**69,1** Usia harapan hidup saat lahir

**12,9** Harapan lama sekolah berdasarkan usia

**7,9** Adalah rata-rata lama sekola (usia >25). Salah satu indikator yang sulit ditingkatkan

**10.053** dollar AS, atau **133,7** setara Rp **133,7** juta. Tetapi, itu baru dirasakan sebagian warga

	<b>THAILAND</b> NILAI IPM 0,741   PERINGKAT 87   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA TINGGI
	<b>TIONGKOK</b> NILAI IPM 0,721   PERINGKAT 91   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA TINGGI
	<b>INDONESIA</b> NILAI IPM 0,689   PERINGKAT 113   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH
	<b>VIETNAM</b> NILAI IPM 0,658   PERINGKAT 118   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH
	<b>FILIPINA</b> NILAI IPM 0,652   PERINGKAT 119   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH
	<b>INDIA</b> NILAI IPM 0,524   PERINGKAT 151   KELOMPOK PEMBANGUNAN MANUSIA MENENGAH



# Sisi Sosial Pendidikan R.A Kartini

Sejak dua tahun terakhir, industri perfilman Indonesia menggeliat dan terus merangkak naik. Selain bertambahnya bioskop yang berdiri di Indonesia, *genre* film Indonesia pun semakin bervariasi. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, banyak pihak menilai para sineas hanya mengejar keuntungan tanpa mengedepankan kualitas, seperti menjamurnya film-film horor saat itu.

Saat ini film Indonesia semakin kreatif dengan kehadiran wajah baru para sineas dan pemeran utama yang muncul meramaikan industri perfilman. Industri film tidak hanya melulu nama Riri Riza, Hanung Bramantyo, atau Garin Nugroho, banyaknya sineas muda seperti Natasha Johana Dematra, Joko Anwar, Sidi Saleh dan sebagainya menjadi opsi lain penonton untuk datang ke bioskop.

Meningkatnya industri perfilman Indonesia juga tidak lepas dari *genre* film biografi yang mengulas sejarah tokoh Indonesia secara nyata. Selama beberapa tahun terakhir, film lokal bertema biografi telah menjadi tontonan hiburan yang paling ditunggu dan menjadi tren yang berkembang cukup pesat di kalangan sineas Indonesia, di samping film yang diadaptasi dari novel tidak kalah menjamur. Beberapa film sejenis yang diciptakan pun laris di pasaran. Sebut saja film seperti *Habibie Ainun*, *Soekarno*, *Jenderal Soedirman*, *Sang Pencerah* dan lainnya sempat menjadi primadona hingga diputar di beberapa negara Asia.

Film bertema biografi sepertinya akan terus bertahan. Pasalnya film-film yang dihadirkan selalu memberikan kesan positif tidak hanya sebatas hiburan, namun selalu memberikan pesan-pesan kehidupan. Terlebih jika tokoh yang dimaksud adalah sosok yang diteladani.

Legacy Pictures salah satu rumah produksi yang belum lama berdiri, melihat peluang tersebut. Setelah memproduksi film pertamanya pada 2015 dengan judul *Kapan Kawin?* kali ini Legacy mencoba peruntungan dengan film *biopic* tokoh pahlawan wanita Indonesia R. A Kartini. Meski beberapa film biografi Kartini sempat dibuat seperti *R.A. Kartini (1984)*, dan kisah fiksi asmara Kartini *Surat Cinta Untuk Kartini (2016)*, Legacy cukup optimis disukai masyarakat. Pasalnya film yang dihadirkan mengambil dari sudut pandang berbeda.

Film *Kartini (2017)* tidak bisa dipandang sebelah mata. Legacy memilih beberapa tokoh publik yang dianggap penting dan cukup sukses di industri perfilman Indonesia. Salah satunya Hanung Bramantyo, sutradara kenamaan yang sukses dengan film-film *box office* dengan jumlah penonton terbanyak. Selain Hanung, aktor utama yang dihadirkan dalam film ini adalah Dian Sastrowardoyo. Memilih Dian merupakan solusi yang tepat. Selain berpendidikan tinggi dan sangat cocok dengan karakter R A Kartini, Dian cepat memahami semua literatur sejarah R A Kartini.

Dalam film ini, Kartini diceritakan sebagai sosok yang cerdas, konsisten, dan terus berusaha mewujudkan keinginannya. Kartini juga sebagai sosok yang suka membaca, belajar, dan memiliki wawasan luas. Kartini digambarkan sebagai satu-satunya perempuan yang memiliki pemikiran maju dan modern di Indonesia saat itu jika dibandingkan dengan wanita lain yang ada di sekelilingnya. "Dari sisi inilah yang kita angkat, dari sosial pendidikannya, dalam film ini kesadaran Kartini sudah jauh melampaui orang-orang di sekelilingnya pada saat itu. Ia sadar kalau semua ilmu yang ia miliki akan sia-sia jika tidak diajarkan kepada orang lain," kata Produser



Robert Roni.

Menurut Dian, film yang ia bintanginya saat ini, merupakan pekerjaan besar. Totalitasnya membintangi film ini terlihat dari setiap *scene* dalam trailer yang dirilis belum lama ini. Di luar *acting*, Dian juga telah mempelajari banyak referensi tentang Kartini. Menurutnya ia sudah mencoba menggali banyak informasi tidak hanya dari cerita orang, namun juga dari buku-buku yang terbelang langka. Seperti buku Pramudya Ananta Toer tentang Panggil Aku Kartini Saja, buku Pikiran-Pikiran Kartini, hingga buku yang diterbitkan di luar negeri dan tidak beredar di Indonesia. "Yang saya lakukan membaca semua literatur Kartini. *gak* cuma kata-katanya, namun perlu proses berfikir, harus direnungkan, diresapi. Kemudian banyak belajar bahasa Jawa *kromo inggil* hingga bahasa Belanda," tutur Dian Sastrowardoyo.

Kartini dalam film ini diceritakan dari semasa kecilnya yaitu ketika memasuki usia 10 tahun. Kartini memiliki cita-cita sekolah tinggi dan fasih berbahasa Belanda. Kartini harus menerima kenyataan untuk dipingit menjadi Raden Ajeng pada usia 12, dan menjadi istri bupati agar menerima keturunan ningrat. Pasalnya, Kartini merupakan keturunan bangsawan dan harus mewarisi darah ningratnya. Ketidaksetujuan Kartini semakin jelas ketika ia melawan dan harus memutuskan adat yang telah digariskan, yang kemudian ia dibenci oleh

Tuan berbeda dengan yang lain



## KARTINI

**Sutradara:** Hanung Bramantyo

**Genre:** Biography | Drama | Family | History

**Pemain:** Dian Sastrowardoyo, Acha Septriasa, Adinia Wirasti, Reza Rahadian

**Tayang:** April 2017

keluarganya. "Panggil aku Kartini saja," tanpa Raden Ajeng. Begitulah yang selalu dia katakan dihadapan adik-adiknya sebagai wujud pemberontakannya.

Kepintaran Kartini membuat jatuh hati Abendanon, pejabat pendidikan dan Kebudayaan Batavia. Dari Abendanon Kartini memperoleh tawaran beasiswa ke Belanda. Kartini sangat senang, tapi, lagi-lagi ayahnya melarang. Sebetulnya sang ayah sangat memahami keinginan Kartini. Apalagi RM Sosroningrat (ayah Kartini) dikenal sebagai seorang keturunan intelektual. Kakek Kartini dikenal sebagai bupati yang memperjuangkan pendidikan untuk pribumi. Karenanya, melarang Kartini sekolah adalah hal yang bertentangan dari Sosroningrat. Tapi, Sosroningrat tak berdaya, dia mendapat tekanan dari keluarga. Kakaknya, RM Hadiningrat, Bupati Kudus, menganggap perlakuan Sosroningrat yang memberikan kelonggaran terhadap Kartini sudah melampaui batas. Karena itu, meski berat

hati, Sosrokartono melarang Kartini mengambil beasiswa ke Belanda. Kartini lagi-lagi terluka. Sebagai obatnya, Kartini meminta izin ayahnya mendirikan sekolah buat perempuan, dan diizinkan ayahnya. Bersama adiknya, Roekmini (Acha Septriasa) dan Kartinah (Ayushita Nugraha), Kartini mendirikan sekolah.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Belanda sedang ditekan oleh negara-negara koloni internasional untuk membuktikan manfaat kolonialisasinya bagi penduduk pribumi jajahan. Mendadak Kartini menjadi sorotan. Utusan dari Gubernur Jenderal Batavia datang ke Jepara mencari Kartini. Tujuannya adalah membawa Kartini ke Batavia, memfasilitasi keinginan Kartini termasuk beasiswa ke Batavia. Pintu kembali terbuka untuk Kartini. Tapi keadaan sudah berubah, ayah Kartini sudah sakit-sakitan. Kartini enggan menambah pikiran ayahnya dengan cita-citanya.

Di lain pihak, kehadiran utusan Gubernur Jenderal ke Jepara membuat

rasa cemburu banyak pihak. Khususnya RM Hadiningrat. Dengan berbagai macam cara, Hadiningrat mencoba menghalangi Kartini memperoleh kesempatannya. Dari menekan Sosroningrat (adiknya) secara politis, hingga mengirimkan surat lamaran menikah disertai ancaman untuk diguna-guna. Sosroningrat semakin tertekan yang mengakibatkan sakitnya makin parah. Kartini bimbang. Jika memenuhi beasiswa ke Batavia maka dia akan meninggalkan ayahnya dalam keadaan tertekan oleh adat dan keluarga. Tapi jika menerima lamaran Hadiningrat, masa depannya dan sekolah perempuan yang dia dirikan bersama adikadiknya akan karam.

Sebagai aktor kawakan, Dian cukup paham memerankan Kartini sebagai sosok manusia yang memiliki kematangan berpikir. Film ini mengingatkan kembali bangsa Indonesia, pernah ada manusia Indonesia yang lahir dengan kemampuan berpikir jauh ke masa depan dan sangat progresif, yang sebenarnya bangsa ini mampu melahirkan kembali sosok seperti Kartini. Bagaimana Kartini bisa melepaskan diri dari keadaan itu?

Film tersebut akan dirilis pada April 2017. Selain Dian Sastrowardoyo, beberapa aktor terkenal seperti Ayushita Nugraha, Acha Septriasa, Adinia Wirasti, Deddy Sutomo, Denny Sumargo, Reza Rahadian, Christine Hakim, dan sebagainya akan menjadikan film lebih menarik dan siap bersaing di bioskop tanah air. (MSR/ARIS/film-bor.com)



**P**ria kelahiran Solo 1 Desember 1957 memang sudah banyak makan asam garam dalam dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dan pernah aktif di Papol Golkar, sebelum akhirnya hijrah ke PDIP.

Di kalangan wartawan, Tjahjo dikenal menteri yang ramah dan sederhana. Keramahan dan kesederhanaan inilah membuat Agus (salah satu wartawan media cetak) tertarik untuk menulis sebuah catatan ringan tentang seorang Tjahjo Kumolo.

Sang penulis, Agus Supriyatna dalam buku ini menceritakan beberapa fakta yang menarik selama dia berinteraksi dengan Tjahjo Kumolo. Seperti saat Tjahjo yang memunyai hobi makan, tidak pernah main golf seumur hidupnya, suka mentraktir wartawan, gemar koleksi barang antik dan batu akik, dan jarang memakai mobil dinas, serta tahan berjabat tangan dengan banyak orang.

Dalam bukunya, Agus membagi pengalamannya selama bertugas meliput kegiatan Kemendagri, terutama kegiatan Tjahjo Kumolo. Mengikuti Tjahjo Kumolo dalam menjalankan tugas negara, membuat Agus mengenalnya dengan baik. Kebiasaan Tjahjo Kumolo ditulis Agus dalam buku ini. Ia ingat betul bagaimana ungkapan yang populer pada sosok Tjahjo Kumolo seperti "Harus Berani Menentukan Sikap, Siapa Kawan, Siapa Lawan". Ungkapan tersebut sering diucapkan Menteri Dalam Negeri saat pidato, saking seringnya kalimat 'siapa kawan, siapa lawan' pun seakan menjadi ciri khasnya Tjahjo Kumolo.

Menurut Agus, jika ingin jadi politisi matang harus banyak belajar kepada Menteri yang satu ini. Agus sedikit banyak mengetahui perjalanan serta lika-liku karir Tjahjo Kumolo. *Track record* dan pengalaman hidupnya bisa menjadi pembelajaran bagi anak muda yang berniat menjadi politisi.

Tjahjo Kumolo bagi Agus adalah tipe politisi yang merangkak dari bawah. Merintis karir dari nol dan memunyai perhitungan yang matang terhadap suatu masalah yang dihadapinya.

Dalam buku yang ditulisnya, Agus juga mengatakan Tjahjo Kumolo seorang menteri yang 'waras'. Pada saat negara dalam suasana tegang, ia malah mele-

## Tjahjo Kumolo Di Mata Wartawan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah kementerian yang secara politis bertugas untuk memastikan garis komando dan loyalitas pemerintahan tegak lurus dari atas ke bawah. Dari Presiden sampai RT (Rukun Tetangga). Selain itu, kementerian ini jadi poros utama pemerintah di Indonesia. Kini, Kementerian 'Pembantu Utama' Presiden itu dikomandani oleh lelaki yang sudah berpengalaman di bidang politik, yakni Tjahjo Kumolo.

parkan candaan yang membuat suasana mencair. Seperti pada saat demo besar-besaran 4 November 2016. Waktu itu, group WhatsApp wartawan dengan dirinya sepi dari pembicaraan, karena beberapa wartawan takut salah berbicara dan menyinggung perasaannya.

Namun, seketika Tjahjo melemparkan candaan tentang bahaya makan nila yang dibarengi kemudian dilanjutkan minum susu. Tjahjo memplesetkannya dengan "Karena Nila Rusak Susu Sebelanga" yang berhubungan dengan kasus Ahok. Suasana pun jadi mencair di

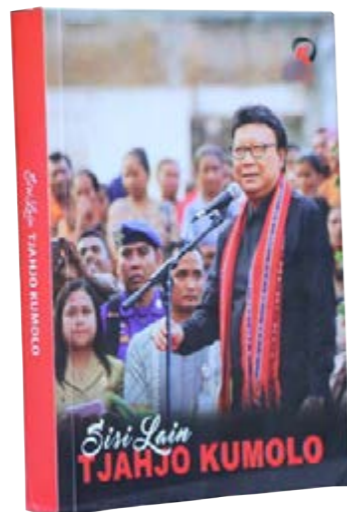
tengah ketegangan hari itu.

Hal itu pun yang membuat Agus merasa 'nyaman' terhadap kakek bercucu tiga itu. Ia mengatakan jarang sekali menemukan pemimpin atau elite yang punya selera humor. Di era Presiden SBY misalnya, nyaris tidak ada humor di lingkup Kemendagri. Sekarang di zaman Presiden Jokowi, terasa kedekatan antara wartawan dan pejabat negeri dengan selera humor yang mendingan dari kemarin.

Secara keseluruhan, buku Sisi Lain Tjahjo Kumolo ini menyuguhkan informasi mengenai Tjahjo Kumolo yang belum pernah terpublikasi oleh media lain. Sehingga menuntun pembaca mengenal lebih dekat sosok Tjahjo Kumolo.

Penulis juga menuangkannya dengan bahasa sangat sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pembaca umum sekalipun. Namun, logika dan pemilihan peristiwa "sisi lain dari Tjahjo Kumolo" kurang menarik, sehingga membuat buku ini terkesan biasa. Penulis sebaiknya perlu riset lebih mendalam, bila perlu menyambangi kediamannya dan mengikuti kegiatan sehari-harinya agar kisah yang disajikan lebih dalam, unik, dan menarik.

Selain itu, dalam buku ini penulis mengaku sudah banyak berhadapan dengan banyak Menteri Dalam Negeri dari era Mardiyanto (2007) hingga kini, namun pendalaman "Sisi Lain Tjahjo Kumolo" kurang kuat dengan membandingkan cara kerja menteri-menteri sebelumnya. Sehingga terkesan membosankan, dan tidak ada penguat dalam penyajian sisi lain Tjahjo Kumolo. (FNH/IFR)



**Penulis:** Agus Supriyatna  
**Penerbit:** Kanet Indonesia  
**Terbit:** Desember - 2016  
**Kategori:** Biografi  
**Halaman:** 325 Halaman

## GAYA HIDUP



**BELAKANGAN** ini, heboh sekali permainan Skip Challenge di tengah siswa sekolah. Aturan main Skip Challenge cukup mengejutkan, yakni dengan menekan sekuat tenaga salah satu temannya hingga pingsan. Setelah merasakan pingsan, mereka yang melakukan hal tersebut seolah merasakan terbang atau fly dan merasakan sensasi luar biasa

**P**ermainan ini bisa sangat berbahaya, pasalnya menurut Dokter jantung dari RSUP Cipto Mangunkusumo, Eka Ginanjar, mengatakan, sebenarnya belum ada penelitian khusus tentang dampak permainan *skip challenge*. Namun, melihat cara permainan ini dilakukan, ia mengingatkan potensi bahayanya terhadap kesehatan tubuh.

Menurut Eka, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ketika *skip challenge* dilakukan. Pertama, saat dada ditekan sekencang-kencangnya, irama jantung akan terganggu. Ini bisa menimbulkan kejang jantung pada orang yang melakukannya.

Lalu yang kedua, ketika dada ditekan, nadi akan melambat dan memicu terjadinya *bradycardia*, yakni kondisi di mana aliran darah berhenti sejenak, sehingga oksigen tidak sampai ke otak dan menyebabkan hipoksia otak yang dapat menimbulkan *stroke*, keracunan karbon monoksida, disfungsi jantung, dan perasaan tenggelam. "Ini berisiko merusak otak secara permanen, bahkan bisa menyebabkan kecacatan dan kematian. Ini permainan menantang bahaya," ujarnya.

Ketiga, tekanan pada dada tempat jantung dan paru-paru berada bisa menimbulkan refleks seperti tercekik (*choking*). Ini juga bahaya. Ketiga hal itu, ujar Eka, belum termasuk potensi terjadinya patah tulang dada jika dada ditekan terlalu keras. Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina juga mengatakan, dalam 8 detik saja otak tidak mendapat suplai oksigen, sel-selnya bisa rusak. Jika itu terjadi berulang, bisa mengurangi inteligensi dan daya pikir.

## Skip Challenge PERMAINAN MENGUNDANG MAUT

### KOMUNIKASI ORANGTUA

**D**ia berharap keluarga dan sekolah perlu mengingatkan anak-anak agar tidak latah ikut melayani permainan menantang yang belakangan marak beredar melalui media sosial. Apalagi, jika permainan itu berpotensi merusak otak secara permanen seperti *skip challenge*. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pun telah melarang keras *skip challenge* dilakukan di sekolah dan rumah. Larangan tersebut disampaikan terkait maraknya peredaran permainan *skip challenge* melalui media sosial.

Psikolog anak Seto Mulyadi pun turut mengingatkan, sifat alami anak adalah selalu ingin tahu dan merasa gagah jika melakukan sesuatu yang dianggap menantang nyali. Orangtua perlu mendampingi anak dalam memenuhi hasrat ingin tahunya. "Perlu kemampuan komunikasi yang baik serta ketersediaan wahana penyaluran bakat siswa. Komunikasi intens dan hangat antara anak, remaja, dan orangtua perlu terus dibangun," kata Seto. Ia menambahkan, jika anak sudah memiliki pengetahuan yang baik, mereka pun pandai menjaga diri dari perilaku negatif.

### PERAN MEDSOS SANGAT KUAT

**D**i lini masa berbagai media sosial dalam lima hari terakhir, permainan *skip challenge* tengah banyak dibicarakan. Marak beredar kumpulan video yang kebanyakan diunggah ulang oleh akun lain berisi pesan peringatan untuk tidak melakukannya. Video tersebut menggambarkan anak remaja berseragam sekolah mempraktikkan *skip challenge*. Umumnya ada satu orang yang ditekan dadanya oleh temannya beberapa detik. Tak lama kemudian, anak yang ditekan

dadanya itu terkulai atau tersungkur tak sadarkan diri, sementara teman-temannya segera duduk mengelilingi dan berusaha membangunkan. Mereka pun tertawa bersama saat si "korban" siuman dengan muka kebingungan. Banyak siswa menganggap aktivitas tersebut merupakan pengalaman yang menegangkan dan menyenangkan. Namun, tanpa disadari, mereka berisiko pingsan karena asupan oksigen ke otak terhenti beberapa saat. (IFR/Harian Kompas)

# Tentang Dia

Muhammad Harya Ramdhoni

**A**KU telah menunaikan tugas ku hingga selesai. Melaksanakan wasiat yang kau sampaikan pada ku pada sepuluh tahun yang lalu. Kala itu senja belum menua. Matahari masih gagah menghadang gelap walau samar mulai membias di ufuk langit sebelah barat. Serombongan petani menyeberangi lembah sehabis bekerja seharian. Wajah-wajah letih namun siratkan gembira dan puas hati. Wajah-wajah lugu lelaki dan perempuan pedalaman, penghuni asli kaki gunung Pesagi sejak nenek moyang pertama. Engkau hadir tiba-tiba di antara semua itu. Menyibak batas antara masa lalu dan masa kini. Engkau bertelanjang dada dan menunggang harimau gergasi. Buah dada mu yang tak lagi kencang menggelambir dimakan usia. Kau hampiri diri ku dengan senyum bengis tanpa sedikitpun perasaan welas asih. Sorot mata mu nan sipit menusukkan aroma masa lalu yang bengis dan munkar.

“Aku Ratu Sakala Baka<sup>1</sup> terakhir!”, katamu.

Kau pameran bekas luka nganga di leher kirimu nan keramat. Aku terpukau bercampur pesona ngeri tak terkira.

“Bukankah penguasa terakhir Sakala Baka adalah seorang lelaki?” Pertanyaanku begitu polos.

“Itulah penipuan jahat yang dilakukan oleh puyangmu!” Engkau membalas sengit.

“Apa salah para puyangku kepadamu? Zuriatku Pernong, Nyekhupa, Belunguh, Bejalan di Way<sup>2</sup>!”

<sup>1</sup>Kerajaan Sakala Baka atau terkenal dengan sebutan Sekala Brak didirikan pertamakali oleh Pangeran Isaka atau juga dikenal masyarakat Jawa sebagai Aji Saka dari dataran tinggi Nepal pada tahun 78 Masehi. Sakala Baka atau Sekala Brak terletak di dataran tinggi Liwa, Lampung Barat.

<sup>2</sup> Pada abad ke 12 M kerajaan Sakala Baka Hindu yang saat itu dipimpin oleh Ratu Sekeghumong jatuh ke tangan penyebar agama Islam dari Peureulak Aceh yaitu Maulana Yamiza Rahmat atau dikenal sebagai Umpu Penggalang Paksi dan empat putranya: Maulana Nazri, Imam Maulana, Maulana Yakub dan Maulana Bahruni. Dalam peristiwa itu Ratu Sekeghumong terbunuh dalam perang tanding melawan salah satu anak Penggalang Paksi yang bernama Maulana Nazri atau Umpu Pernong.



Ilustrasi Ratu Wijaya Tunggadewi of Kerajaan Pulau Rempah | by Gambargin

Tiba-tiba ku merasa perlu membela harga diri ku dan kehormatan para leluhur berpuluh keturunan sebelum aku walaupun aku tidak tahu bagaimana wajah sebenarnya para leluhur ku itu.

Engkau terkekeh menghina pembelaan ku.

“Percuma, cucunda. Kau bela mereka hingga kau pertaruhkan nyawa mu, justru hanya semakin membuatmu malu. Cepat atau lambat akan kau ketahui sendiri betapa para puyang mu tidak lebih kumpulan pengecut namun berlagak perwira!”

Aku semakin meradang dihina seperti itu. Engkau datang begitu saja tanpa permisi. Sebagai hantu dari alam arwah berdimensi tidak terkira. Tanpa tata karma semburkan ayat-ayat

Sejak saat itu hingga kini Sakala Baka berubah menjadi konfederasi kerajaan-kerajaan Islam dengan sultan masing-masing yang berdaulat dan berkuasa penuh.

hujatan pada leluhur ku yang budiman.

“Ini adalah riwayat tua, sesuatu yang betul-betul terjadi namun tabu dibincangkan di antara keturunan dinasti kakek moyangmu yang konon perkasa.”

“Riwayat apa? Kenapa pula mesti tabu diluahkan?” Aku kebingungan mendengar pernyataanmu.

“Di sini ada kisah jawara dan pecundang. Atau mungkin lebih tepatnya kisah para pengecut yang menjadi pemenang, dan lawannya seorang perempuan gagah berani yang dikalahkan secara memalukan.”

“Nampaknya engkau memuji diri sendiri. Betapa narsis dirimu! Persis seperti kebanyakan perempuan modern di abad ini, rajin memuja kecantikan diri dan mematu diri di depan cermin sehabis pedicure dan medicure di salon mahal. Padahal usiamu telah berlalu sembilan abad, bukan? Dan siapa saja yang kau maksud para pengecut yang menjadi jawara, wahai perempuan purba? Para puyang ku kah? Dasar kau iblis bajingan!” Umpatan ku adalah puncak amarah tidak terkendali. Di saat itu aku tidak sepenuhnya yakin dirimu setan yang berubah wujud menjadi manusia atau hanyalah manusia setengah setan.

Engkau malah tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan ku. Gembira sekali dirimu, wahai perempuan purba. Demikian girang hati mu, hingga tubuh halus mu terguncang-guncang menikmati setiap tawa renyah yang keluar dari mulutmu. Wahai ruh yang telah berkelana dan tersesat di alam raya sejak sembilan ratus tahun lalu, siapakah dirimu sebenarnya?

“Aku Sekeghumong<sup>3</sup>, Ratu terakhir kedatuan Sakala Baka. Aku adalah perempuan, bukan lelaki seperti dikabarkan para puyang mu di dalam tambo. Aku berperang melawan lima leluhur mu, seorang bapak yang keras kepala dan empat anak lelakinya yang juga berkepala batu. Semua itu demi menegakkan amanah leluhurku dan harga diriku yang telah dicabik dan dihinakan. Nasib dan takdir Allah SWT tidak berada di pihakku, aku tumpas dalam semalam oleh keris puyangmu bernama Pernong...”

“Sebentar...”, aku menyela, “kau menyebut Allah, bukankah dirimu pemuja batu dan pokok? Sejak bila kau mengimani Allah Yang Esa? Semua penduduk Sakala Baka percaya dirimu mati sebagai penyembah berhala!”

“Itulah rahasia yang lama disembunyikan di dalam peti mati masa silam wangsamu, wangsaku, wangsa kita semua, wangsa Sakala Baka yang mulia dan keramat. Sesuatu yang harus kau maklumkan kepada setiap orang dari generasi mu. Bahwa aku telah mengikrarkan syahadat di depan para leluhurmu ketika mereka menawarkan ajaran Jalan Yang Lurus kepadaku. Ya, aku memang setengah hati memeluk agama baru itu. Semua ini demi menyelamatkan tahtaku di pepadun<sup>4</sup> Sakala Baka dan

<sup>3</sup> Ratu Sekeghumong atau Dapunta Beliau Ratu Sekeghumong merupakan ratu terakhir kerajaan Sakala Baka Hindu-Bhairawa yang berkuasa pada abad ke 12 Masehi. Ia ditaklukkan oleh para penyebar agama Islam dari Peureulak Darussalam, Aceh.

<sup>4</sup> Pepadun, singgahsana raja Sakala Baka.

menghindari perang melawan para puyangmu yang telah berhasil menghimpun beribu pengikut dari kalanganku sendiri. Aku terpojok, aku didesak ke belakang oleh mahkamah sejarah!”

“Jadi iba aku mendengar kisahmu...”

“Tak perlu. Aku tak butuh simpatimu, apalagi air mata buaya penuh kepura-puraan! Dengarkan baik-baik kisah ku dan tuliskan sebagai sebuah hikayat agar siapa saja mendapat manfaat dari kisah pilu ku ini.”

Aku terdiam tanpa sepatah kata.

“Memeluk agama Jalan Yang Lurus bukan akhir ceritaku. Bapak ke empat puyangmu, lelaki bernama Maulana Yamiza Rahmat alias Umpu Penggalang Paksi, memaksaku turun dari tahta Sakala Baka karena perempuan diharamkan menjadi raja. Katanya hal itu termaktub dalam ajaran Jalan Yang Lurus. Atas nama ajaran baru itu pula ia hendak merebut pepadun ku. Maka mati adalah jawabannya, cucunda! Aku tak gentar setindak pun demi bertempur mempertahankan daulat diriku dan Sakala Baka. Ini adalah tugas sejarah yang ditimpakan Allah kepadaku. Ku terima semua ini dengan hati lapang walau dengan sedikit masygul karena putri tunggal ku lebih memilih dikawini

Memeluk agama Jalan Yang Lurus bukan akhir ceritaku. Bapak ke empat puyangmu, lelaki bernama Maulana Yamiza Rahmat alias Umpu Penggalang Paksi, memaksaku turun dari tahta Sakala Baka karena perempuan diharamkan menjadi raja

salah seorang leluhurmu si Belunguh daripada ikut membela maruah ibundanya. Lalu terjadi apa yang semestinya berlaku seperti telah tertulis di Lauh Mahfuz. Aku bertempur melawan leluhurmu yang perkasa, Maulana Nazri alias Umpu Pernong. Dalam semalam diriku tumpas oleh kedigdayaan dirinya dan kerisnya, menyisakan luka nganga di leher ku ini. Di hari itu tamat sudah riwayat selusin abad Sakala Baka. Berakhirlah kisah penerus jurai Pangeran Isaka dari dataran tinggi Nepal...”

Engkau berhenti bicara. Kulihat air matamu menetes. Ruh yang menangis. Meluapkan kesal pada masa lalu yang mengkhianatimu. Pada kekalahan melawan orang-orang asing yang dengan semena-mena merebut kuasa kedatuan darimu. Puji Tuhan yang mengizinkan aku menyaksikan keajaiban ini.

Azan Maghrib memecah peralihan senja menjelang malam. Membuat kami sama-sama terdiam menyimak panggilan lillah sambil terus saling memandangi.

“Aku harus pulang”, kataku, “waktunya sembahyang Maghrib.”

“Tunggu...” Kali ini nada suara mu setengah memohon.

“Apalagi? Aku cukup paham dengan maksud mu menyebut para puyang ku pengecut karena memutarbalikkan fakta jenis kelamin mu. Mereka malu jika dikenang oleh anak cucu pernah berkelahi, bahkan membunuh seorang perempuan. Namun pertempuranmu melawan melawan Puyang Dalom<sup>5</sup> Maulana Pernong berlaku secara perwira, dan kau pula dikalahkan olehnya secara ksatria. Cukup adil, bukan? Atau kau hendak menyebut tindakan para puyangku merebut kerajaanmu ada-

<sup>5</sup> Puyang Dalom, sebutan untuk leluhur lelaki atau perempuan di dalam masyarakat adat Sai Batin Sakala Baka atau Sekala Brak di Lampung Barat.

lah tindakan pengecut? Itu adalah pertandingan yang sah dan biasa terjadi di dunia kuno. Siapa kuat dia-lah raja!”

“Bukan! Bukan karena semua itu, cucunda. Walau memang demikianlah adanya kepengecutan para puyangmu dalam pandanganku. Tetapi bukan itu inti pertemuan kita di senja ini. Kau mengaku berpuyangkan Maulana Yakub alias Umpu Belunguh, bukan? Berarti kau cucuku sendiri. Sebab Shindi putriku, puyang perempuanmu, adalah istri Belunguh. Kau memiliki darah Sekeghumong, itulah darahku sendiri walau hanya setitik dan mungkin tak berarti bagimu...”

Aku tercekot mendengar hujahmu. Tenggorokanku tiba-tiba kering begitu saja. Lalu kupandangi dirimu dan ku bandingkan dengan diriku sendiri. Jelas tidak ada kemiripan di antara kita. Wajah mu tirus, mata mu sipit seperti perempuan Mongol. Wajah ku sedikit Arab dengan campuran lokal disertai sepasang mata yang proporsional.

“Kau mengherani dirimu sendiri yang tidak mirip denganku”, katanya, “sebab darah para Arab penyamun itu lebih kental di dalam dirimu dibanding darah ku yang hanya setitik di dalam tubuhmu.”

Mataku terbelalak mendengar ucapanmu. Penghinaan yang keterlaluan.

“Itu bukan sindiran. Kata-kataku adalah nyata. Kelak engkau akan tahu mengapa para leluhur mu kusebut sebagai Arab penyamun.”

“Karena mereka merebut kuasa Sakala Baka dari tanganmu secara paksa!”, bentak ku dalam amarah yang semakin menjadi.

“Cerdas! Kau lebih pintar dibanding yang kukira. Tidak salah kupilih diri mu sebagai perawi kisah ku kelak.”

Engkau tertawa terbahak-bahak lagi. Kali ini dengan suara yang semakin membesar dan sanggup merobek seisi kalbu. Terguncang-guncang tubuh halusmu yang serupa siluet. Demi memuaskan diri pada histeria kebahagiaan. Badan halus yang tertawa senang. Ruh penasaran yang bergembira. Mungkin ini yang disebut gelak tawa disertai hentakan tenaga dalam seperti pernah ku baca dalam cerita-cerita silat bertahun-tahun silam.

“Aku tidak sudi menulis kisahmu!”

“Kelak kau akan menulisnya untuk ku, sebab itu adalah tugas sejarah bagi mu. Aku telah menunggu kehadiran seorang cucu berbakat sepertimu sejak sembilan abad yang lalu. Dulu ku pikir salah seorang kakek buyut mu si Meurah Dani alias Haji Harmain yang akan menulis kisah ku. Tetapi ia lebih tertarik menghafal Al Qur’an dibanding berkhayal dan menulis cerita seperti dirimu. Ketika kau pertama kali datang kesini aku telah menandai mu. Engkaulah cucunda yang kutunggu sejak sembilan ratus tahun berlalu. Terpujilah Allah dengan segala firman-nya!”

“Tidak! Aku takkan menulis tentang mu! Takkan pernah terjadi!”

“Berjanjilah pada ku, cucunda. Agar puas hati ku.”

“Tidak! Kenapa engkau memaksa ku?”

“Baiklah. Aku takkan memaksa. Tapi pertemuan hari ini akan terus menghantui alam bawah sadar mu sehingga

membuat mu terpaksa menulis. Aku punya banyak tabungan kesabaran. Telah ku nanti dirimu sejak sembilan abad silam. Menunggu pintu hati mu tergerak dalam setahun dua tiada mengapa bagiku.”

Kali ini aku yang tertawa terbahak-bahak mendengar pengharapannya yang musykil. Bagaimana mungkin seorang manusia yang masih bernyawa menulis kisah hidup orang lain yang sudah mati berdasarkan perbincangan mistik berbeda alam. Sungguh aneh dan menggelikan. Cemoooh dan tawa sinis adalah yang paling tepat untukmu. Toh, mentertawai perilaku makhluk halus takkan dicatat dalam kitab kejahatan oleh malaikat yang bertengger di bahu kiri.

“Jangan tertawa terlalu gembira. Tugas mu tidak berhenti dengan hanya menulis kisah hidup ku saja. Masih banyak leluhurmumu yang menanti jasa baik mu. Aku bukanlah pelamar tunggal, cucunda.”

“Siapa lagi yang kau maksud sebagai para leluhur itu?” Seketika diriku dihinggapi rasa takut yang mengerikan sesaat setelah menanyakan hal itu.

Sekeghumong menunjuk ke arah timur gunung Pesagi.

Nun di kejauhan terlihat sosok lima lelaki bersorban putih berdiri menantang malam. Tubuh mereka tinggi besar diselimiuti cahaya putih keperakan. Aura yang indah namun juga menyeramkan. Mereka memandang ke arah ku dengan tatapan mata bersungguh-sungguh dan penuh harap. Wajah-wajah Timur Tengah dengan kewibawaan mempesona. Membalas tatapan mereka membuat tubuhku lemas. Seakan luruh tak bertulang. Saat ku tersadar semuanya berubah menjadi hening. Malam pekat menyisakan bunyi jangkrik di kejauhan. Suara kodok sawah mengalun bagai paduan suara milik sang malam. Kemudian disusul suara anjing melolong dari segala arah. Aku terjebak di antara alam ruhani dan jasmani. Alam antara ada dan tiada. Lima lelaki bertampang Arabia lenyap tidak berbekas. Meninggalkan tatapan mata penuh harap padaku yang dihujam ketakutan. Sementara, Ratu Sakala Baka terakhir telah pergi menunggang harimau gergasi kesayangannya entah kemana. Meninggalkan wasiatnya untuk kutulis sebagai sebuah hikayat dan sepenggal tuturan baru kepadanya yang terasa asing bagiku: Puyang Dalam Ratu Sekeghumong.

Kuala Terengganu, Malaysia, 22 Desember 2015

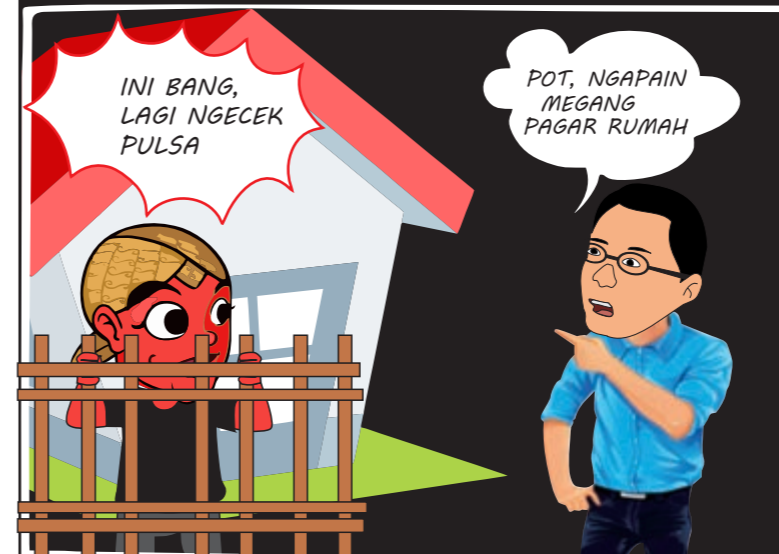


Kali ini aku yang tertawa terbahak-bahak mendengar pengharapannya yang musykil. Bagaimana mungkin seorang manusia yang masih bernyawa menulis kisah hidup orang lain yang sudah mati berdasarkan perbincangan mistik berbeda alam. Sungguh aneh dan menggelikan.



## BANG PEPE

### CEPOT PUNYA 'HP'



Opini Rochayati Basra

## INOVASI DAERAH DI PERSIMPANGAN JALAN

**A**rus desentralisasi yang dicanangkan pemerintah sejak era reformasi sejatinya membawa angin segar bagi pengembangan potensi kedaerahan. Sebelum era reformasi, banyak sekali potensi daerah yang belum terekspos dan dimanfaatkan secara luas yang sangat disayangkan. Padahal, tidak menutup kemungkinan, potensi daerah yang terus digali dengan inovasi akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Di Indonesia, istilah inovasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mulai mengemuka terutama sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut. Sejumlah daerah giat mengembangkan inovasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan perbaikan iklim ekonomi. Dalam kurun 10 tahun terakhir pasca reformasi misalnya, banyak daerah telah menunjukkan peningkatan kinerja yang dipicu oleh praktik inovatif. Inovasi yang didasarkan pada semangat untuk membuat pelayanan publik “lebih dekat, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah” seakan jadi antitesis dari stigma yang sempat begitu lekat dalam birokrasi. Inovasi bahkan menjadi kata kunci penting dalam menakar berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Di bidang tata kelola pemerintah, banyak inovasi dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain terkait dengan upaya pengembangan sistem transparansi, mekanisme penanganan aduan masyarakat, dan lain-lain. Sejumlah daerah ino-

vasi pun bermunculan, seperti Gianyar, Sragen, Jembrana yang dikenal produktif dalam menghasilkan terobosan-terobosan.

Namun sayangnya, di era tersebut regulasi mengenai inovasi daerah belum dibunyikan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, banyak kepala daerah yang terpaksa berurusan dengan hukum, dengan dakwaan pelanggaran administrasi di bidang inovasi.

Semarak inovasi di tingkat lokal dan nasional ternyata hingga saat ini belum disertai penyediaan payung hukum yang kuat bagi para inovator di daerah. Dalam banyak hal, inovasi yang dilakukan sering berbenturan dengan ketakutan rezim administrasi yang berlaku. Tidak jarang inovasi yang bertujuan memperbaiki pelayanan publik justru dipandang sebagai praktik pelanggaran administrasi yang memiliki implikasi hukum.

Kriminalisasi terhadap praktik inovasi tentu saja kontraproduktif terhadap upaya mendorong inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam menemukan solusi-solusi jitu untuk mengatasi persoalan di daerahnya. Para kepala daerah akan berpikir ratusan kali untuk berani mengambil kebijakan terobosan yang tidak memiliki sandaran hukum meskipun memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Akibatnya, kondisi tersebut membuat inovasi daerah berada pada persimpangan jalan. Pada satu sisi kepala daerah dituntut untuk melakukan berbagai inovasi, di sisi lain diskresi dalam prosedurnya dianggap salah dan bahkan banyak dianggap melanggar hukum administrasi keuangan negara yang menjerat kepala daerah masuk penjara.

Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan dan memperlihatkan perlunya regulasi yang mampu mengawasi dan menjamin keselamatan kepala daerah dalam bentuk peraturan yang kuat. Setelah direvisinya UU No 32 Tahun 2004 yang dipandang sudah tidak sesuai perkembangan menjadi UU No 23 Tahun 2014 barulah dalam UU tersebut membunyikan peraturan tentang inovasi yang selanjutnya diturunkan dalam PP tentang Inovasi Daerah.

RPP Inovasi Daerah yang sebentar lagi akan disahkan menjadi PP itu adalah petunjuk teknis dalam melakukan Inovasi daerah. Standar tersebut menjadi garis linier agar inovasi daerah tidak lagi berada dalam persimpangan jalan. Pedoman ini diharapkan menjadi sinergitas dalam setiap gagasan berinovasi yang berupaya untuk mengartikulasikan amanat UU No 23 Tahun 2014. Selain itu, RPP ini juga menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dari inovasi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan membentuk daya saing daerah dalam pemberdayaan yang partisipatoris bagi setiap elemen masyarakat.

Dalam PP tersebut, tentu isu perlindungan hukum mendapat perhatian serius ditunjukkan dengan adanya satu peraturan khusus yang mengatur inovasi daerah. Ada pasal yang berbunyi “Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintahan daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparat daerah tidak dapat diproses secara pidana sepanjang tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

Dengan begitu kita berharap disahkannya RPP Inovasi Daerah ini nantinya tidak hanya mencegah upaya kriminalisasi terhadap kebijakan inovatif. Lebih dari itu, PP ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi praktik-praktik inovatif penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Dengan kata lain, upaya mengatur inovasi daerah tidak didasarkan pada semangat evaluasi dan penghakiman, tetapi pada semangat fasilitasi dan perlindungan pusat terhadap kreativitas daerah dalam melakukan perbaikan.

### Bukan Sekadar PP Inovasi Daerah

Melihat fakta empirik dan regulasi tersebut perlu ada solusi strategis dan operasional yang tidak hanya mendukung peran pemerintah dalam upaya meng-gol-kan RPP Inovasi Daerah. Tetapi pemerintah pusat perlu memerhatikan beberapa hal, yakni melakukan konsistensi penerapan regulasi dalam bentuk Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah

tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang petunjuk teknis Inovasi Daerah dengan menugaskan dan pengendalian langsung Kepala Pusat Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan.

*Kedua*, Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan dan inovasi daerah, melalui BPP Kemendagri melakukan langkah-langkah memperkuat kelembagaan Pusat Inovasi Daerah dengan memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia), mensosialisasikan PP Inovasi Daerah, menyiapkan laboratorium inovasi daerah, melakukan konsolidasi dan kerja sama dengan daerah, K/L (Kementerian Lembaga) dan lembaga non Kementerian terkait inovasi, serta melakukan evaluasi secara berkala di lintas kementerian.

Perkuatan kelembagaan Pusat Inovasi Daerah ini menjadi penting untuk menghasilkan dan mengkaji naskah akademik demi kemajuan inovasi di daerah. Bilaperlu, Puslitbang Inovasi Daerah diperkuat menjadi Direktorat Jenderal Inovasi Daerah atau Badan Inovasi Daerah. Dengan perkuatan kelembagaan itu, inovasi daerah akan semakin percaya diri disokong oleh lembaga yang lebih kuat menaunginya.

Pemerintah pusat dalam hal ini juga perlu menyiapkan daya saing dan pemberdayaan daerah, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan kepala daerah yang baru terpilih, agar inovasi tidak hanya sebuah kewajiban semata, tapi didorong dan didukung penuh oleh pemerintah. Bila perlu, pemerintah harus melakukan *join* dengan negara lain, membangun kemitraan dengan lembaga privat, dunia usaha, dan perguruan, memfasilitasi hasil produk unggulan inovasi serta melakukan pameran bersama dan pemberian penghargaan bagi daerah yang berinovasi.

Langkah strategis dan operasional tersebut tentu juga menjadi tantangan bagi BPP Kemendagri untuk melakukan berbagai persiapan dini dalam konteks implementasi kebijakan yang diberlakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

BPP Kemendagri senantiasa dituntut memegang komitmen secara baik menjaga marwah regulasi dan cita-cita mulia ini. Melalui PP ini, sumbu utama dalam memacu berbagai pembangunan yang ada di daerah dalam konteks perkembangan juga perlu menggandeng budaya lokal, merekatkan tangan, dan saling membahu demi kemajuan daerah sesuai dengan karakter masing-masing.



**Rochayati Basra,**  
Kepala Puslitbang Inovasi  
Daerah BPP Kemendagri

Opini Djoko Sulistyono

## PENGEJAWANTAHAN DEMOKRASI PANCASILA

**K**ekhawatiran terhadap konflik sosial dengan eskalasi besar dan luas menjadi hal yang tidak terhindarkan di era reformasi sekarang ini. Pengelolaan atau manajemen konflik menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan diwujudkan. Konflik-konflik tersebut itulah yang hingga kini mengakibatkan kerugian, kepedihan, dan dendam yang tidak berkesudahan.

Bahkan Presiden Joko Widodo sempat menyoroti masalah terhadap praktik demokrasi di Indonesia belakangan ini. Pada pidatonya dalam pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura saat pada Februari 2017 lalu, Presiden menyebut praktik demokrasi di Indonesia kebablasan sehingga membuka peluang munculnya ideologi ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam identitas Indonesia yang majemuk.

Situasi seperti saat ini sebenarnya pernah terjadi saat Orba lahir, rasa persatuan dan kesatuan bangsa tampak rapuh. Almarhum Alfian, mantan pejabat Deputi Pengkajian dan Pengembangan BP-7 Pusat (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila kala itu mengatakan kepentingan primordial mengalahkan kepentingan bersama yang bersifat nasional. Suasana saling curiga yang bersumber pada sikap mau benar sendiri dan mau menang sendiri mengalahkan suasana saling percaya yang bertumpu pada rasa kebersamaan yang intim. Kebebasan atau keterbukaan kalau dibiarkan akan cenderung menjadi tidak terkendali, seperti yang terlihat di zaman Demokrasi Liberal, sehingga mudah menjurus ke suasana anarki yang meru-

sak persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kekhawatiran yang berlebihan terhadap kebebasan atau keterbukaan cenderung mendorong mereka yang berkuasa untuk melakukan pengekan yang ketat, seperti di zaman Demokrasi Terpimpin, sehingga menjurus ke dalam suasana otoriter/totaliter (Alfian, dan Nazaruddin Sjamsuddin, 1991).

Adanya sikap-sikap ekstrim seperti itu sudah seharusnya dihindari oleh bangsa Indonesia yang sudah berumur hampir 72 tahun. Perkembangan iklim demokrasi di Indonesia kian hari kian bertambah sehat harus terus diupayakan. Permasalahan yang menyangkut demokrasi pada tataran akar rumput (*grassroot*), biasanya terjadi karena persaingan antara elit politik di arena pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sering memanfaatkan massanya bagi kepentingan diri dan kelompoknya. Namun, hal itu justru terkadang membuat adanya dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan demokrasi di tanah air. Sejatinnya elit politik di tanah air perlu menanamkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme bangsa kepada massa pendukungnya. Paling tidak, dengan cara itu, diharapkan keinginan *founding fathers* bangsa ini tercipta.

Budaya Indonesia harus berkembang ke arah pengakuan pada nilai-nilai demokrasi yang ada di bumi Indonesia. Seperti halnya demokrasi yang mengakui adanya perbedaan, maka keanekaragaman budaya yang tumbuh di dalam masyarakat atau di daerah tetap harus diakui dan dipelihara keberadaannya. Demokrasi jangan sampai dimatikan, akan tetapi harus tetap dibiarkan tumbuh, yang justru harus diakui sebagai kekayaan bangsa dan perlu didorong untuk maju. Kebudayaan-kebudayaan

setempat diharapkan terus mengembangkan demokrasi untuk ikut membentuk kebudayaan nasional sebagai kerangka sekaligus fondasi kehidupan nasional dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Adanya situasi dan kondisi sosial politik akhir-akhir ini, maka perlu adanya keterbukaan politik menjadi penting untuk dilakukan. Secara substansial, perlu adanya pengawasan secara efektif dan efisien. Pengawasan ini mencakup pengawasan politik (*political control*) maupun pengawasan sosial (*social control*) yang berlangsung di Indonesia Berkaitan dengan keterbukaan politik, T.B Simatupang mengatakan, dalam negara demokrasi, perlu adanya kekuasaan yang cukup di tangan Pemerintah, tetapi juga diusahakan agar ada cukup kebesaran dan tanggung jawab di tangan masyarakat untuk mengawasi, mengkritik, dan mengoreksi penggunaan kekuasaan oleh Pemerintah (T.B. Simatupang, 1988).

Masalah keterbukaan politik sebenarnya bisa dipahami sebagai konsekuensi logis dari kesepakatan kita menganut sistem politik demokrasi yakni dari, oleh dan untuk rakyat. Keterlibatan politik masyarakat tidak saja diperlukan, tetapi juga merupakan kewajiban. Keterbukaan itu sendiri hendaknya bergerak dalam kerangka budaya politik yang mengandung keharmonisan, bukan mengarah kepada kemungkinan timbulnya konflik. Keterbukaan politik akan lebih bermakna jika kita mampu menciptakan keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam keterbukaan tersebut dan harus ada keseimbangan antara arus yang *top down* dan arus yang *bottom up*. Masyarakat tidak saja diberikan informasi, akan tetapi bersamaan dengan itu perlu memperhatikan informasi dari mereka tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.

### Budaya Demokrasi Pancasila

Almarhum Alfian pernah mengemukakan hal ini pada awal 1990 an, bahwa salah satu kunci ke arah itu memang terletak pada peningkatan suasana dan kualitas keterbukaan dalam masyarakat kita. Dari berbagai macam manifestasi aspirasi demokrasi yang hadir dan berkembang dalam masyarakat kita beberapa tahun ini, semuanya tampak bermuara pada keinginan untuk mengembangkan suasana dan kualitas keterbukaan itu (Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (ed), 1991).

Arus dan semangat baru kebangsaan ini memang tampak lebih diwarnai oleh keinginan untuk meningkatkan proses demokratisasi atau kualitas proses demokra-

si kita, dengan jalan mengembangkan suasana keterbukaan yang lebih wajar, sehat, dan berkualitas. Dari sini berkembanglah aspirasi demokrasi mereka yang pada esensinya menghendaki pengembangan suasana keterbukaan yang lebih wajar dan sehat.

Budaya politik demokrasi Pancasila pada esensinya bertumpu pada persenyawaan antara nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan nilai-nilai demokrasi dalam satu jalinan yang saling mengisi dan saling memperkuat. Asumsi yang dinyatakan Alfian adalah sekarang ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan relatif sudah membudaya, antara lain karena keberhasilan pembangunan, seyogyanyalah pembangunan budaya politik Demokrasi Pancasila yang sedang kita lakukan sekarang ini lebih banyak memperhatikan pengembangan dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi (Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, 1991).

Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah seharusnya menjadi landasan pedoman yang berfungsi sebagai filter untuk mengevaluasi dan menyeleksi nilai-nilai yang akan masuk. Bahkan nilai-nilai lama, tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran yang sudah ada dalam kebudayaan nasional dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila akan ikut terseleksi. Jadi betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya agar bangsa Indonesia benar-benar dapat memahami dan menghayati dinamika internal yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memungkinkan mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, yaitu pemikiran-pemikiran yang relevan dengan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, dan sekaligus juga relevan dengan pembangunan dirinya serta perubahan jaman.

Pengembangan pemikiran baru harus pula memiliki relevansi dengan dinamika kehidupan masyarakat dan negara kita. Jadi sangat tergantung kepada keberhasilan kita dalam memiliki pengetahuan empirik yang luas tentang berbagai segi yang menjadi pusat perhatian di dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya agar bangsa Indonesia mampu mengatasi problematik dengan melemahnya kehidupan demokrasi kita belakangan ini. Mudah-mudahan hal ini dapat meningkatkan pengembangan ke arah demokrasi yang lebih baik, dengan mengingat kepada adanya pesan Sumpah Pemuda yaitu: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia yang selalu menjadi pijakan di mana kita melangkah ke depan.



**Djoko Sulistyono,**  
Peneliti Badan  
Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri

## Panggung Pengukuhan Identitas Sosial

Hasil *exit poll* Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan *Kompas* pada 19 April 2017 menunjukkan, ikatan berbasis sosial terutama etnis dan agama menjadi penentu kemenangan Anies-Sandi. Rasionalitas pilihan warga yang bersandar pada kinerja atau pun program yang ditawarkan pasangan calon kepala daerah ternyata bukan menjadi determinan. Kesamaan primordial mendapat ruang terbesar dalam pilihan warga DKI. Itulah kunci kemenangan Anies-Sandi. Al hasil, Ahok-Djarot *keoq* dalam kontestasi tersebut.

Memang, malang nian Jakarta dan Indonesia. Bagaimana tidak, kalau di Jakarta saja orang masih bersandar pada politik identitas, bagaimana di daerah lain? Jadi, janganlah membayangkan orang Makassar di Sulawesi Selatan bisa menjadi Gubernur di Bali. Atau, orang Jawa yang muslim menjadi Gubernur di Nusa Tenggara Timur. Bahkan, orang Papua adalah mustahil jadi Gubernur di Aceh.

Padahal, secara demografi, penduduk di Jakarta itu lebih majemuk dan berpendidikan. Tingkat ekonominya pun relatif lebih tinggi ketimbang orang di daerah. Tetapi tak dinyana, pada konteks politik, identitas sosial itu menjadi sangat penting untuk menentukan keterpilihan seorang pelayan pemerintahan tertinggi di provinsi. Situasi dan kondisi seperti itu pada batas tertentu bisa membahayakan. Palsunya, kalau itu bertahan dan berkelanjutan, sudah barang pasti bisa memantik konflik politik dan kerawanan sosial.

Pertama, masyarakat Jakarta telah mengalami polarisasi sosial, sehingga orang lebih protektif menciptakan sekat sosial. Jadi, perbedaan identitas seperti agama dan suku bukanlah akar masalah, tetapi hanya pemicu terjadinya konflik karena masyarakat sudah terpolarisasi. Kedua, dalam kemiskinan komunikasi, perbedaan identitas lebih mudah menciptakan loyalitas eksklusif dibandingkan solidaritas inklusif.

Ketiga, keresahan sosial secara serampangan menemukan jawabannya pada sikap pasrah dan patuh, yang menunjukkan ketergantungan massa terhadap elite. Keempat, propaganda politik, dengan orientasi kemenangan kompetitif, telah menciptakan "pemilih yang marah", yang berkecenderungan memusuhi perbedaan. Untungnya, konflik politik itu tidak melebar luas di akar rumput. Sehingga, Jakarta masih relatif aman.

Tetapi, yang jelas, DKI Jakarta telah gagal menjadi con-

toh bagi daerah lain dalam beradu gagasan dan program saat kontestasi politik pilkada berlangsung. Bahkan, boleh dibilang, Pilkada Jakarta gagal mengembangkan tradisi demokrasi. Indikatornya, partai politik tidak bertransformasi dari peran tradisional mereka sebagai broker politik dan parpol gagal melakukan kaderisasi. Terbukti, Anies dan Ahok bukanlah kader dari sebuah partai politik.

Selain itu, elite tertinggi partai memanfaatkan dukungan politik mereka hanya untuk memperkuat patronase dan pemusatan kekuasaan. Para kandidat juga tidak memiliki kemampuan dialog dan negosiasi yang baik, mereka lebih pandai memuji diri sendiri atau menjelekkan lawan, bukannya mengedepankan nilai dan tradisi demokrasi.

Celakanya, publik pemilih, justru terjebak pada populisme dan tidak mampu mengembangkan hubungan kritis dengan kandidat. Hal ini diperparah juga dengan penyelenggara dan pengawas pilkada yang tidak profesional menjalankan perannya. Tidak heran kalau DKPP menjatuhkan sanksi, meskipun ringan, kepada Ketua KPU Jakarta.

Pada konteks inilah Anies-Sandi berhasil memainkan tiga hal mencolok. Pertama, menguatkan politik identitas yang berasosiasi dengan agama dan etnis (ras); kedua, menguatkan gerakan "Islam konservatif dan Islam radikal"; dan ketiga, mengentalkan politik simbolisme dan hegemoni (perebutan) makna.

Dalam merebut hegemoni makna, jelas terlihat kecenderungan di masyarakat pada Pilkada Jakarta untuk saling "perang" simbol dan "perang" wacana. Berbagai pernyataan untuk menggiring opini publik terus dilakukan oleh kelompok Anies-Sandi terhadap Ahok-Djarot, seperti munculnya jargon kafir, bid'ah, ahli neraka, pemimpin kafir, dan zalim, karena tidak pro-pada warga miskin.

Anies-Sandi sukses mengapitalisasi isu-isu tersebut, sehingga membangkitkan dan menguatkan "konservatisme" Islam di Jakarta. Hal itu ditandai dengan adanya pergeseran wajah Islam dari Islam yang ramah (*a smiling face*), moderat dan progresif ke Islam yang konservatif dan radikal. Keduanya sangat menikmati dan mengambil benefit dari pergeseran itu, sehingga mereka berjaya memenangkan kontestasi politik di DKI Jakarta 19 April lalu seraya mengukuhkan panggung identitas sosial di Jakarta.

● Moh Ilham A Hamudy

# MATRA PEMBARUAN

JURNAL INOVASI KEBIJAKAN

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal baru di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang fokus pada publikasi hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah. Dijadwalkan MP akan terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November) mulai 2017. Sebagai jurnal ilmiah, MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.

## Call for Papers



KONTRIBUSI NASKAH DIKIRIMKAN DENGAN MENGIKUTI PETUNJUK PENULISAN, SEBAGAI BERIKUT:



- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

SISTEMATIKA PENULISAN TERDIRI DARI EMPAT PEMBABAKAN:

Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (American Psychological Association) style  
Lampirkan biodata ringkas dan nomor telepon seluler penulis

Kirimkan artikel Anda ke [MATRAPEMBARUAN@GMAIL.COM](mailto:MATRAPEMBARUAN@GMAIL.COM)

Batas akhir penerimaan naskah oleh redaksi untuk edisi Juli 2017 paling lambat 14 Juni 2017.

Keterangan lebih detil silakan lihat di [www.matrapembaruan.com](http://www.matrapembaruan.com)

Researchers, lecturers,  
and public administration experts  
are invited to contribute  
their scientific papers to

## JURNAL BINA PRAJA



**TERMS & CONDITIONS** - Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number

Submit a scientific paper  
on the theme of Home Affairs Governance  
to [jurnalbinapraja@yahoo.com](mailto:jurnalbinapraja@yahoo.com)

Accredited No 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016

# CALL FOR PAPERS

THEME

“Home Affairs Governance”

SUBTHEME

- Regional Autonomy and Bureaucracy
- Politics and Public Administration
- Territorial Administration and Rural Governance
- Population and Civil Registration
- Regional Election and Regional Innovation
- Regional Fiscal Policy and Development
- Other Issues in Public Administration

PUBLISHED BY



INDEXED BY:

